



MINGGU III MARET 2024

• TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 •

# info indonesia

HARGA, @ Rp 20.000,-



Election  
2024



# PRABOWO-GIBRAN RESMI MENANG 58%

AKHIR PENANTIAN PRABOWO, TERIMA KASIH JOKOWI

MANTAP GUGAT  
KE MK AMIN  
RAGU DAPAT  
KEADILAN

ULAMA JUGA  
HARUS  
PAHAM SOAL  
POLITIK

PILWAKO  
PALEMBANG BUKAN  
HANYA MILIK RATU  
DEWA DAN FITRI

SRI MULAYANI  
ENGGAK URUS  
MAKAN SIANG  
GRATIS

“Saya ingin juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo”

**Prabowo Subianto**



## Telak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai melakukan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 pada Rabu sore, 20 Maret 2024, di mana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul telak atas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tak tanggung-tanggung, pasangan nomor urut 02 itu menang di 36 dari 38 provinsi di Tanah Air.

Hasil ini pun menjadi akhir penantian Prabowo Subianto yang telah ikut dalam tiga pemilu sebelumnya, yakni pada 2009 sebagai calon wakil presiden, serta pada 2014 dan 2019 sebagai calon presiden.

Kemenangan Prabowo pun tidak lepas dari peran Presiden Jokowi yang pada dua pemilu sebelumnya menjadi rival. Pada pidato kemenangannya, dia tak ragu mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang telah merangkulnya dengan menjadi Menteri Pertahanan.

Namun, Prabowo juga akan dihadapkan dengan tantangan pada pembentukan kabinet mendatang. Partai Golkar yang mengaku paling berjasa atas kemenangan Prabowo-Gibran secara gambling sudah meminta jatah lima kursi menteri. Sementara, PAN juga dikabarkan meminta jatah dua kursi menteri, meski masih malu-malu mengakui dan menyebut bahwa hal itu menjadi hak prerogatif presiden terpilih.

Di sisi lain, Prabowo-Gibran juga harus siap menghadapi gugatan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua paslon bahkan menyatakan menyiaipkan banyak pengacara untuk mengawal proses gugatan Pemilu 2024 yang dinilai sarat kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Sementara itu, hasil Pileg 2024 menempatkan PDIP sebagai pemenang untuk ketiga kalinya sejak 2014 dengan meraih 16,72 persen suara sah. Posisi kedua diraih Partai Golkar yang meraih 15,28 persen suara sah. Enam partai lainnya yang lolos ke Senayan yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan PAN.

PPP dan PSI bersama delapan partai lainnya dinyatakan tidak lolos ambang batas parlemen karena perolehan suaranya di bawah 4 persen. Namun, PPP dan PSI masih punya kans lolos ke Senayan jika melakukan gugatan di MK.

Selain soal hasil Pilpres dan Pileg 2024, dinamika perpolitikan Tanah Air bakal bergeser pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang dipastikan akan tetap berlangsung pada November mendatang. Sejumlah tokoh sudah mulai bermunculan untuk bersaing menjadi orang nomor satu, baik di Tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

DKI Jakarta bakal menjadi pusat sorotan publik dalam Pilkada 2024. Meski statusnya yang tak lagi menjadi ibu kota, Jakarta tetap menjadi magnet politik nasional.

Di luar Jawa, misalnya di Sumatera Selatan, dinamika politik jelang Pilkada 2024 juga semakin menarik, baik untuk perebutan kursi gubernur maupun bupati dan wali kota.

Apalagi setelah duet petahana Herman Deru dan Mawardi Yahya yang akhirnya bakal pecah kongsi, meski sebelumnya menyatakan akan kembali maju bersama. Herman Deru bakal menggandeng Lury Elza Alex Nurdin, sedangkan Mawardi Yahya sudah mendeklarasikan diri maju dengan mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo.

Selamat membaca!!!



**info indonesia** INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung  
**PT. DUA SATU PRO**  
Sertifikat Dewan Pers  
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

**PENDIRI/ DIREKTUR** : Usman Rizal

**PEMIMPIN PERUSAHAAN**: Adam Aulia Manzal Khan **PEMIMPIN REDAKSI**: Rusdiyono **WAKIL PIMPINAN REDAKSI**: Rahmad Romli  
**REDAKTUR PELAKSANA**: Irmayani **REDAKTUR**: Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina **REPORTER**: Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir **EDITOR & GRAFIS**: Al Amin, Achilles **TATA LETAK**: Sujatmiko **MEDIA SOSIAL**: Haidir Ali **KEUANGAN** : Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI**: Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS**: M. Iqbal, Zul Fahmi **ADMINISTRASI**: Ega Tri Gustina **DISTRIBUSI**: Abdul Muchtar

**HARGA IKLAN**: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

**BANK ACCOUNT**: \*A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur **ALAMAT REDAKSI/IKLAN/**

**PEMASARAN**: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 **TELP** 021-791 96781 **FAX** 021-791 96786 **PALEMBANG** Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Palembang 30126 **TELP** : 0711-7442344



“Agak ragu karena di sana ada paman. Tapi berharap anggota MK lainnya terbuka akan kecurangan yang dilakukan Jokowi. Terutama pra pemilu”

*Tamsil Linrung*

# MANTAP GUGAT KE MK AMIN RAGU DAPAT KEADILAN

**Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menyatakan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil akhir pleno rekapitulasi Pilpres 2024, Rabu malam, 20 Maret 2024.**

“Kami tegaskan, kami tak ingin membiarkan berbagai penyimpangan demokrasi ini berlalu tanpa catatan dan menjadi preseden buruk bagi semua penyelenggaraan pemilihan ke depan, baik tingkat nasional maupun ratusan pilkada dan pileg tingkat I dan II,” kata Anies.

Anies mengaku sadar bahwa ada pihak-pihak yang menyarankan agar tidak mengajukan gugatan penyimpangan karena kemungkinan mendapatkan keadilan yang kecil. Namun, ia mengatakan berbagai ketidaknormalan tersebut tidak dapat dibiarkan.

“Berbagai lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan Pemilu dan penyelesaian sengketa telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang terbukti melanggar etik. Bahkan ada yang ketuanya sampai berkali-kali mendapat peringatan tapi tetap dibiarkan menjalankan perannya,” ungkapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak semua untuk terus melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum, sehingga apapun temuannya akan menjadi fakta sejarah bangsa ini.

“Kita dukung langkah tim hukum dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” tegas Anies.

Menurut rencana, Tim AMIN akan datang ke MK pada 21 Maret 2024 untuk menggugat keputusan KPU Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024 agar dibatalkan.

Anies pun mengungkapkan bahwa dia berharap pertolongan Allah SWT saat membawa masalah ini ke MK.

“Kami berharap pertolongan Allah SWT, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, semoga Allah bukakan dan teguhkan

hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparisial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka tanggung jawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa,” ungkap Anies.

“Keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang dipertanggungjawabkan di hadapan anak cucu mereka di kemudian hari,” imbuhnya.

Anies bilang keputusan timnya menggugat hasil KPU adalah demi Indonesia yang lebih baik serta harapan bangsa Indonesia yang ingin ada perubahan.

“Ini adalah harapan kita dan kami yakin insya Allah mereka bisa jalankan apa yang jadi harapan kita semua,” ucapnya.

Anies juga mengatakan, dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting dari hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan.

“Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar, akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi kepercayaan dan inklusivitas

hasilnya,” ujar Anies.

Menurut dia, tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan.

“Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu izinkan kami sampaikan pernyataan untuk menanggapi proses pemilu yang sejak awal hingga kini,” kata Anies.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa proses Pilpres 2024 jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Dia pun mengkritisi proses Pemilu 2024 baik sebelum maupun setelah.

“Sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita sudah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini,” ungkap Cak Imin.

Cak Imin membeberkan sejumlah fakta proses Pemilu 2024 banyak sekali kekurangan, mulai dari rekayasa regulasi di MK hingga intervensi alat negara.

“Dan semua ini sudah jadi catatan media serta jadi catatan publik,” ucapnya.

Cak Imin bilang bahwa dia dan pasangan membawa misi perubahan yang ujungnya memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya itu, Cak Imin menyebut AMIN akan kembali menegaskan demokrasi dan menunaikan janji reformasi.

Oleh karena itu, Cak Imin menegaskan bahwa pihaknya belum mau kalah atas keputusan KPU. “Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir kami putuskan meminta tim hukum timnas AMIN untuk maju ke MK,” jelasnya.

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) bersiap untuk melangsungkan langkah hukum mengajukan sengketa pemilu ke MK mengenai pengumuman hasil Pilpres 2024. Meski diakui ragu pada MK, Timnas AMIN mengatakan tetap ada harapan terhadap lembaga Tuhan itu.

Asisten Pelatih Timnas AMIN, Tamsil Linrung, mengatakan, rencana untuk segera menggulirkan pengajuan sengketa pemilu ke MK merupakan arahan dari Anies Baswedan. Ia mengaku bahan-bahan dan segala macamnya sudah siap dan tinggal dieksekusi.

“Sejak hari Jumat lalu Tim Hukum Nasional

(THN AMIN) sudah rampungkan seluruh persiapan untuk ke MK,” ujar Tamsil.

Tamsil mengaku sebenarnya ada keraguan untuk mengajukan sengketa pemilu ke MK karena ada kepentingan politik yang tumbuh. Yakni adanya hakim konstitusi Anwar Usman, paman cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka, yang berpolemik sejak awal kontestasi pilpres berlangsung hingga diberhentikan jadi jabatan Ketua MK ketika itu.

“Agak ragu karena di sana ada paman. Tapi berharap anggota MK lainnya terbuka akan kecurangan yang dilakukan Jokowi (Presiden RI yang juga kakak ipar Anwar Usman). Terutama pra pemilu,” ungkapnya.

Juru Bicara Timnas AMIN, Usamah Abdul Aziz, menambahkan, walau bagaimanapun pihaknya tetap berusaha untuk mengajukan sengketa pemilu ke MK atas dasar semangat berdemokrasi.

“Apapun hasil KPU kami akan tetap mengajukan ke MK karena kami ingin mendorong adanya demokrasi yang lebih baik,” ujarnya.

Usamah meyakini data dan fakta mengenai dugaan kecurangan atau pelanggaran pemilu yang selama ini dikumpulkan Timnas AMIN memiliki kekuatan untuk dikaji mendalam secara konstitusional.

“Bukti yang akan kami sajikan adalah bukti yang tidak terbantahkan. Kami percaya MK akan memperbaiki citranya di publik setelah meloloskan Gibran,” ujar dia. ●RDO



“Kalau melihat fakta nyatanya 36 provinsi itu membuktikan bahwa ini adalah legitimasi yang terbaik yang didapatkan dari seorang presiden, legitimasinya cukup besar, dibandingkan lawannya hanya menang 2 provinsi, bahkan ada yang nol, di kandang sendiri pun tidak menang”

Efriza



# AKHIR PENANTIAN PRABOWO TERIMA KASIH JOKOWI

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat suara terbesar dalam Pilpres 2024.**

**P**asangan nomor urut 02 ini memperoleh 96.214.691 suara sah atau setara dengan 58,58 persen dari total suara nasional 164.227.475.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara sah atau 24,94 persen dari total suara sah. Kemudian pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mendapat 27.040.878 suara sah atau 16,46 persen dari total suara sah.

Prabowo-Gibran menang di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Mereka juga unggul dalam pemungutan suara di luar negeri. Dua provinsi lainnya dimenangkan oleh Anies-Muhaimin. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tak menang di provinsi mana pun.

Dalam pidato kemenangannya, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. “Saya ingin juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo,” kata Prabowo di depan kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu malam, 20 Maret 2024.

Prabowo menuturkan, dengan sikap kenegarawanannya, Jokowi telah memberikan contoh rekonsiliasi besar di Indonesia. Prabowo menyebut dirinya dirangkul oleh Jokowi, meski keduanya adalah rival dalam Pilpres 2014 dan 2019.

“Bahkan, beliau (Jokowi) yang juga sangat besar mendorong saya, sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat (memenangkan Pilpres 2024). Karena itu, saya harus menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada beliau,” kata Menteri Pertahanan itu.

Prabowo menyebut kepemimpinan-nya kelak akan bergerak di atas landasan pembangunan yang dilakukan Jokowi, khususnya di bidang ekonomi. Dengan begitu, pemerintahannya kelak bisa bekerja dengan cepat untuk melaksanakan berbagai program kerja yang sudah dicanangkan.

“Landasan kuat yang telah beliau bangun, khususnya di bidang ekonomi, akan kita gunakan untuk kita bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja untuk membawa hasil secepat-cepatnya kepada rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyebut dirinya sudah mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi presiden RI.

“Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia ada di



tangan kami,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, dengan mandat tersebut, dirinya dan Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk pendukungnya. Dia berharap pemilih pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk memberikan kesempatan kepada dirinya bekerja keras untuk Indonesia.

“Kami akan menjadi presiden dan wakil presiden pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kami kesempatan. Kami akan buktikan, kami akan jadi presiden-wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja yang sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Dalam pidatonya sekitar 15 menit itu, Prabowo banyak menekankan soal persatuan. Prabowo menekankan bahwa Pilpres 2024 telah usai. Karena itu, dia mengajak pendukungnya, pendukung pasangan Anies-Muhaimin, dan pendukung Anies-Muhaimin untuk bersatu kembali.

Prabowo menjelaskan, perbedaan pilihan ataupun pendapat adalah hal yang baik dan harus dihormati. Dia pun menghormati rakyat yang memilih Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Namun, setelah berbeda pendapat, rakyat harus kembali bersatu.

“Marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain. Jangan kita mau selalu dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah oleh kamu imperialis dan kaum kolonialis. Cukup, cukup, cukup!” kata Prabowo.

Setelah berpidato selama 15 menit menyampaikan pesan persatuan, Prabowo meneriakkan kata merdeka sembari mengepal-

kan tangan kanannya ke udara. “Merdeka!! Merdeka!! Merdeka!!,” teriak Prabowo dan diikuti oleh pimpinan partai politik pendukungnya.

Dia lantas mengajak masyarakat dan relawannya yang hadir untuk menggemakan takbir. Menurutnya, kalimat takbir tepat diucapkan di tengah bulan Ramadhan.

“Karena ini adalah bukan suci Ramadhan, izinkanlah kami untuk, untuk takbir. Allahu akbar!! Allahu akbar!! Allahu akbar!!,” teriak Prabowo sambil mengepalakan tangan ke udara dan diikuti oleh semua hadirin.

Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, mengatakan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 merupakan kemenangan rakyat Indonesia.

“Kalau melihat fakta nyatanya 36 provinsi itu membuktikan bahwa ini adalah legitimasi yang terbaik yang didapatkan dari seorang presiden, legitimasinya cukup besar, dibandingkan lawannya hanya menang 2 provinsi, bahkan ada yang nol, di kandang sendiri pun tidak menang. Ini membuktikan bahwa masyarakat itu sangat mempercayai calon presiden ini dan bukti bahwa masyarakat kita ini menunjukkan keberpihakan kepada program siapa yang dipilih,” ujar Efriza, Rabu, 20 Maret 2024.

Efriza menambahkan, kemenangan meyakinkan Prabowo-Gibran dengan menyapu bersih di hampir mayoritas provinsi di Indonesia menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, ada beberapa provinsi di Jawa yang digadang-gadang akan dimenangkan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar seperti di DKI Jakarta atau Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, ternyata meleset dari dugaan. Justru dua provinsi itu juga dimenangkan Prabowo-Gibran.

Selain itu, menurut Efriza, faktor kemenangan Prabowo-Gibran itu salah satunya karena program yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu lebih diterima dan disukai masyarakat.

Dengan hasil pilpres ini, program yang disukai masyarakat yaitu keberlanjutan pemerintahan atau meneruskan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.

Efriza optimistis transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo-Gibran juga dipercaya akan berjalan lancar. Sebab, berkaca dari transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014 ke Presiden Jokowi yang saat itu dianggap oposisi saja berjalan baik, apalagi Jokowi ke Prabowo yang masih dalam satu tim kerja.

“Dan ini sekali lagi menunjukkan satu sisi bahwa tingkat estafetnya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo masyarakat ingin dilanjutkan programnya, dan ini artinya pemerintahan yang sangat smooth sekali kalau dulu saja kan dari SBY rival penguasa kepada oposisi lancar,” paparnya.

“Apalagi kalau ini benar-benar program lanjutan dan sama satu tim lagi dan ini membuktikan bahwa gambaran lanjutan apa yang dibawa oleh Pak Prabowo ini selaras dengan keinginan dari masyarakat dengan narasi survei kepuasan masyarakat atau publik kepada Pak Jokowi yang masih tinggi 75-80 persen,” ucapnya.

Efriza menambahkan, narasi Prabowo-Gibran yang bercita-cita membawa Indonesia Emas 2045 ternyata juga mendapat kepercayaan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong setelah resmi pengumuman pemenang Pilpres 2024 dari KPU, kandidat yang kalah mau menerima hasil yang telah diputuskan. ●RDO



“Kalau MK membatasi hanya pada perbedaan perolehan suara, maka MK menjadi Mahkamah Kalkulator dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan”

Todung Mulya Lubis

INFO  
PILPRES

Minggu III • Maret 2024

5

# MK JADI BENTENG TERAKHIR

**Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyampaikan sikap resminya usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pilpres 2024. Dalam pernyataannya, Ganjar belum mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan sebagai pemenang kontestasi nasional.**

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu justru menyampaikan langkah selanjutnya yang akan diambil Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ke depan. Salah satunya adalah pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tim akan segera mendaftarkan itu dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir. Tentu saja harapan kita MK-lah yang nanti mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan,” ungkap Ganjar di Posko Teuku Umar, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024.

Dalam sebulan terakhir, Ganjar bersama Mahfud mendengarkan cerita masyarakat terkait tercorengnya pelaksanaan Pemilu 2024, mulai dari dilolokannya Gibran menjadi calon wakil presiden, politisasi bantuan sosial (bansos), hingga pengerahan aparat negara.

Hal tersebut tentu mencoreng harapan masyarakat yang menginginkan Pemilu 2024 dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Sebaliknya, pencorengan demokrasi justru terjadi selama proses pelaksanaannya.

“Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi,” ujar Ganjar.

Menurutnya, sekarang adalah momentum terbaik bagi MK untuk mengembalikan muruah lembaganya dan demokrasi Indonesia. Dia berharap sembilan hakim konstitusi menunjukkan kredibilitasnya dalam mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024.

“Setelah dulu ada putusan MKMK, setelah juga kita melihat penyelenggara mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita harus mengembalikan kredibilitas demokrasi kita menjadi ini jauh lebih baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan, saksi-saksi yang akan membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke MK sudah siap. Hal ini terkait saksi-saksi

dugaan kecurangan Pilpres disebut ketakutan untuk

memberikan kesaksian di MK dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Menurut Mahfud, saksi-saksi ditangani Ketua Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

“Ya infor-

masinya siap sih. Kan yang nangani Pak Todung dan kawan-kawan,” kata Mahfud se usai acara buka bersama sukarelawan di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu malam, 20 Maret 2024.

Terkait persiapan saksi-saksi, dia meminta agar ditanyakan ke Todung. Namun, Mahfud meyakini mereka akan memberikan kesaksian di sidang nanti. “Tanya ke Pak Mulya saja. Besok akan kemukakan di sidang itu,” ujar mantan Menko Polhukam ini.

Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan, pihaknya akan mengajukan gugatan hasil Pemilu 2024 ke MK pada Minggu, 24 Maret 2024. TPN sudah menyiapkan berkas permohonan disertai bukti-bukti dan saksi.

“Mudah-mudahan MK memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami, kepada semua pemohon untuk menyampaikan isi permohonannya dengan semua argumentasinya,” ujar Todung.

Dia juga berharap MK tidak membatasi pemeriksaan gugatan atau permohonan hanya pada persoalan sengketa atau perbedaan perolehan suara. Sebab, hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sarat akan curang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Kalau MK membatasi hanya pada perbedaan perolehan suara, maka MK menjadi Mahkamah Kalkulator dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan,” katanya.

Menurut Todung, persoalan Pemilu 2024 bukan hanya pada pelaksanaan pemungutan suara dan hasil rekapitulasi suara, tetapi pada seluruh tahapan, bahkan di masa kampanye. Selain itu, perlu ada penyelidikan apakah ada intervensi kekuasaan, politisasi bansos, dan kriminalisasi terhadap kepala desa hingga kepala daerah, bahkan pengerahan

han terhadap pemilih untuk memilih paslon tertentu.

“Inilah yang membuat saya cemas dan khawatir kalau masalah semacam ini tidak dipersoalkan. Saya sebagai deputi hukum dari paslon 3 Ganjar-Mahfud sering ikut kampanye ke beberapa tempat, saya tidak pernah percaya Ganjar-Mahfud tidak bisa menang di Bali, padahal itu stronghold-nya PDIP, kenapa bisa kalah di Jateng, juga di Sulawesi Utara dan NTT,” ungkap Todung.

Menurutnya, semua pihak harus membuka mata bahwa ada sesuatu yang salah dengan Pemilu 2024, sehingga perlu ada tindakan untuk mengoreksi kesalahan tersebut.

“Bukan kita menolak pemilu, tapi kita ingin memperbaiki dan mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam proses pemilu,” katanya.

Todung juga menjelaskan, setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024, maka semua pihak memiliki waktu 3 hari untuk menyiapkan permohonan untuk diajukan ke MK.

“Kita ada waktu 3 hari dan setelah itu kita akan menyiapkan semuanya dan mungkin tanggal 24 Maret 2024, kita akan ke MK. Setelah itu, kita akan tunggu panggilan dari MK kapan sidangnya, dan mungkin 25 Maret atau 26 Maret sudah ada sidang,” ujar Todung.

Lebih lanjut, Todung menyampaikan, setidaknya ada 30 saksi yang akan diajukan. Meski demikian, tergantung MK akan menerima berapa saksi untuk dimintai keterangan.

“Kita siapkan sekitar 30 saksi, kita punya saksi ahli ada 10, tergantung kepada MK nanti akan menerima berapa saksi,” kata Todung.

Ketika ditanya mengenai Kapolda yang akan dihadirkan sebagai saksi sebagaimana disebut Wakil Deputi Hukum TPN, Henry Yosodinigrat, Todung mengatakan hal itu masih dalam pertimbangan.

“Saya enggak mau menyebutkan siapa ya, yang pasti saya kecewa Kapolri melarang Kapolda menjadi saksi,” ujar Todung.

• RDO





“Saya melihat kehadiran Syaiful Huda, dari PKB dan juga Ketua Komisi X saat ini, menambah banyak pilihan terkait calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat”

Ujang Komaruddin



# KUDA HITAM PILKADA JABAR

**Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Barat, Syaiful Huda, mengumumkan niatnya untuk menjadi calon gubernur (Cagub) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.**

**K**eputusan ini didasarkan pada peningkatan signifikan suara PKB di Jawa Barat, yang meningkat sebanyak 1 juta suara pada Pemilu 2024.

“Dengan kepercayaan yang diberikan ini, PKB mengalami peningkatan suara dan kursi yang signifikan di Jawa Barat, dan kami akan menjaga kepercayaan masyarakat ini. Oleh karena itu, saya menyatakan kesiapan saya untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang,” ujar Huda di Kantor DPW PKB Jawa Barat.

Dengan memilih opsi untuk maju sebagai Cagub, Huda berkomitmen untuk membangun koalisi dengan berbagai partai yang bersedia mengusung kader PKB dalam Pilgub Jawa Barat 2024.

“Dalam konteks ini, PKB akan kembali membangun koalisi dengan beberapa partai, di luar figur yang telah mendeklarasikan atau sedang dalam perjalanan untuk maju lagi sebagai calon gubernur,” jelasnya.

Menurut arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kata dia, pilkada harus menjadi bagian dari aliran perubahan yang diusung dalam Pilpres 2024 dengan pasangan Anies-Muhaimin.

Dalam konteks tersebut, komunikasi akan dimulai dengan partai yang mendukung pasangan Amin yaitu Koalisi Perubahan sebelum berkomunikasi dengan partai lain.

“Namun, kami tegaskan bahwa PKB siap untuk berkoalisi dengan partai manapun, termasuk di luar koalisi perubahan,” tambahnya.

Muhaimin Iskandar sendiri telah memberikan restu untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat.

“Ya, beliau (Muhaimin) mendukung semua kader untuk maju baik dalam Pilgub, Pilbup, maupun Pilwakot,” tegasnya.

DPRD Jawa Barat sendiri, lanjut Huda, telah berhasil meraih 15 kursi, sehingga masih memerlukan 9 kursi lagi untuk dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Syaiful menyampaikan bahwa tinggal 3 bulan lagi sebelum mencapai tahap inti, yaitu pendaftaran calon pada bulan Agustus 2024.

“Kami akan berbicara dengan koalisi yang bergabung dalam pilpres, ketika belum ada kesepakatan karena pilkada memiliki konfigurasi politik dan figur yang berbeda, sehingga dinamikanya pasti tidak sama dengan koalisi perubahan pada Pilpres,” tambahnya.

Syaiful Huda tidak menutup kemungkinan adanya potensi perpecahan dengan PKS dan NasDem dalam Pilkada 2024.

Apalagi jika melihat PKS memiliki lebih banyak kursi daripada PKB. Di sisi lain, NasDem memiliki delapan kursi. Namun, kedua partai tersebut menjadi prioritas untuk digandeng dalam satu koalisi yang sama di Jawa Barat.

“PKS dan NasDem adalah awal dari agenda rembesan agenda perubahan yang dibawa oleh AMIN. Pilkada menjadi bagian dari agenda Pilpres. Pada Pilkada Jawa Barat ini, kami akan menerapkan kampanye model slepet Imin dan Desak Anies. Kami ingin Pilkada menjadi partisipasi publik, bukan sekadar mobilisasi publik,” katanya.

Meski begitu, jika tidak ada kesepakatan di antara ketiga partai tersebut atau salah satu dari mereka, PKB siap untuk berkoalisi dengan partai di luar Koalisi Perubahan.

“Untuk dapat mengusung, kami membutuhkan 24 kursi atau 20 persen. Kami masih membutuhkan sembilan kursi lagi. Mungkin bisa bersama NasDem yang memiliki 8 kursi, atau diajaknya PSI. Atau PKB, NasDem, PPP juga cukup mungkin,” ujarnya.

Namun, pihaknya tetap akan berkomunikasi dan bernegosiasi terlebih dahulu dengan partai-partai di dalam Koalisi Perubahan.

“Itu adalah hal untuk nanti. Kita tidak selamanya harus menjadi partai besar untuk menjadi gubernur. Jadi, mungkin bisa membentuk poros di luar itu,” tambahnya.

Pengamat Politik, Ujang Komarudin, memberikan pandangannya mengenai deklarasi Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, yang akan maju sebagai Cagub dalam Pilgub Jabar pada bulan November mendatang.

Ujang menyatakan bahwa kehadiran Syaiful Huda dalam Pilgub Jabar akan membuat pertarungan untuk merebut kursi nomor satu di Jabar menjadi lebih menarik.

Menujarnya, dengan adanya Syaiful Huda, pilihan terkait calon pemimpin Jabar menjadi lebih beragam, selain dari

nama-nama sebelumnya seperti Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi yang merupakan kandidat kuat.

“Saya melihat kehadiran Syaiful Huda, dari PKB dan juga Ketua Komisi X saat ini, yang merupakan anggota DPR terpilih dari Dapil Jabar VII Jawa Barat, menambah banyak pilihan terkait calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat,” jelas Ujang.

Ujang juga menilai bahwa Syaiful Huda berpotensi menjadi kuda hitam dalam Pilgub Jabar karena latar belakangnya yang berasal dari PKB dan NU.

“Syaiful Huda, karena berasal dari PKB dan NU, bisa menjadi kuda hitam dalam Pilkada nanti,” ujarnya.

Terkait poros politik yang akan muncul dalam Pilgub Jabar, Ujang menyatakan bahwa semuanya masih belum pasti dan dinamis.

Namun, menurutnya, yang terpenting adalah calon-calon tersebut memiliki dukungan dari suara di DPR, yang nantinya akan menentukan poros politik dalam Pilgub Jabar.

“Mengenai jumlah poros politik yang akan muncul, semuanya masih belum jelas, semuanya dinamis. Karena aturannya adalah dukungan minimal 20 persen kursi di DPR, jadi kalau dihitung 20 persennya masing-masing, bisa lima pasang, atau maksimal empat pasang, tapi juga bisa tiga pasang, semuanya masih dinamis. Yang penting, mereka maju sesuai dengan aturan dukungan suara kursi di DPRD,” paparnya. ● IRY





“Partai Golkar harus kembali memimpin Jawa Tengah menuju masa depan yang lebih baik. Dengan prestasi yang telah ditunjukkan oleh Mas Dico sebagai Bupati Kendal”

Abraham Sridjaja

# INFO PILKADA

Minggu III • Maret 2024

7

## GOLKAR HARUS KEMBALI BERJAYA

Setelah masa jabatan dua periode dari Ganjar Pranowo, beberapa nama terkenal telah muncul dalam bursa Calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah pada Pilkada serentak 2024, termasuk Bupati Kendal Dico Ganinduto.

**N**ama Dico Ganinduto semakin terangkat dan dianggap sebagai kandidat kuat untuk merobut kursi nomor satu di Jawa Tengah.

Hal ini dikarenakan nama Dico sering masuk dalam 5 besar dalam beberapa survei sebagai kandidat yang potensial untuk bertarung dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 di Jawa Tengah mendatang.

Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPMII), Kamilov Sagala menjelaskan, elektabilitas Dico meningkat berkat efek Pilpres 2024 di mana terjadi pergeseran dukungan.

Survei-survei tersebut menyebutkan adanya faktor elektoral yang sebelumnya lebih memilih politisi senior dan berumur, namun sekarang beralih ke politisi muda yang telah membuktikan kinerjanya.

“Pilpres 2024 juga menjadi pemicu bahwa generasi muda bisa menjadi pemimpin di Jawa Tengah. Contohnya Dico Ganinduto, seorang pemuda yang memiliki kapasitas, bahkan bisa dijadikan sebagai panutan seperti Emil Dardak jika generasi muda dapat memimpin dengan aksi dan kinerja yang nyata,” ujar Kamilov.

Kamilov menyatakan bahwa dengan melihat komposisi geografi dan budaya politik, posisi Dico diprediksi akan mendapatkan dukungan yang kuat di wilayah Utara dan Selatan Jawa Tengah.

“Jika kita memperhatikan komposisi politik geografis yang sebelumnya cenderung merah, sekarang setelah Pilpres 2024 diprediksi akan ada perubahan, di mana suara dari kalangan generasi muda seperti Dico akan sangat berpengaruh di wilayah Utara dan Selatan, terutama di kalangan nelayan,” jelasnya.

Sementara untuk wilayah tengah, lanjut Kamilov, Dico perlu bekerja lebih keras untuk mendapatkan dukungan dari kalangan sesepuh dan kyai.

Hal ini karena pemilih di wilayah tersebut lebih cenderung mendengarkan pandangan dari sesepuh dan tokoh dari NU maupun Muhammadiyah.

“Kehadiran generasi muda

seperti Dico dalam pertarungan Pilgub Jateng bisa menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh kandidat lain. Karena Dico telah membuktikan kapabilitas dengan kinerja nyata selama menjabat sebagai Bupati Kendal,” tambahnya.

Dico Ganinduto merupakan Bupati Kendal periode (2021-2024) dan namanya telah masuk dalam bursa Cagub Jateng dalam beberapa survei. Salah satunya, lembaga survei Aksara, pada Januari 2024 merilis empat nama yang masuk dalam bursa sebagai Cagub Jawa Tengah.

Dalam hasil survei tersebut, Hendrar Prihadi menempati urutan pertama, diikuti oleh KH. H. Yusuf Chudlori, sementara Dico Ganinduto berada di posisi ketiga. Sedangkan Sudirman Said berada di posisi terbawah.

Sedangkan, politisi dan pengusaha muda dari Partai Golkar, Abraham Sridjaja, telah memberikan dukungan penuh kepada Dico Ganinduto sebagai Cagub Jawa Tengah dalam Pilkada 2024.

“Partai Golkar harus kembali memimpin Jawa Tengah menuju masa depan yang lebih baik. Dengan prestasi yang telah ditunjukkan oleh Mas Dico sebagai Bupati Kendal, kami yakin dia adalah kandidat terbaik untuk membawa provinsi ini ke era baru pembangunan dan kemakmuran,” ujar Abraham Sridjaja.

Abraham Sridjaja juga mengajak semua elemen masyarakat Jateng, termasuk anak muda dan pengusaha, untuk bersatu mendukung Dico Ganinduto.

“Kita memerlukan energi dan inovasi baru, serta persatuan dari semua kalangan untuk memenangkan Mas Dico Ganinduto. Jawa Tengah membutuhkan pemimpin yang dapat menginspirasi dan memajukan seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya dengan semangat.

Abraham Sridjaja juga ber-

janji akan turun langsung ke Jateng dan bekerja bersama tim kampanye Dico Ganinduto jika Dico resmi menjadi Calon Gubernur Jateng.

“Apabila Partai Golkar telah menunjuk Mas Dico dan Mas Dico sudah siap maju sebagai Jateng 1, saya akan datang ke Jawa Tengah, bergerak, bertemu, dan berdiskusi dengan masyarakat,” jelasnya.

Upaya Abraham Sridjaja ini mencerminkan komitmen Partai Golkar bukan hanya dalam merebut posisi kepemimpinan, tetapi juga dalam memastikan bahwa kepemimpinan tersebut akan membawa perubahan positif yang nyata bagi masyarakat

Jateng.

“Saya akan menyampaikan pengalaman saya sebagai sahabat beliau yang sepenuhnya berkomitmen untuk kemajuan Jawa Tengah, terutama bagi pemuda Jateng,” tegas Abraham.

Sebelumnya, Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto, mengonfirmasi bahwa ia akan maju sebagai Cagub Jawa Tengah yang didukung oleh partai berlogo beringin tersebut.

“Saya diperintahkan oleh Partai Golkar untuk menjadi Calon Gubernur di Jawa Tengah, dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya,” ujarnya belum lama ini.

Meskipun sudah mendapat perintah secara langsung dari partai, Dico menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum Presiden atau Pilpres 2024.

“Saya akan tetap fokus memberikan dukungan terbaik kepada Mas Gibran hingga Pilpres selesai. Setelah itu, barulah kita akan memikirkan Pilgub,” ungkap Dico.

Selain berupaya membantu kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Dico juga ingin terus fokus menyelesaikan pembangunan dan program kerja sebagai Bupati Kendal.

“Saya masih harus menyelesaikan program-program di Kendal, jadi saya belum memikirkan Pilgub Jateng. Fokus saya saat ini adalah di Kendal dan membantu kemenangan Mas Gibran,” tambahnya.

Sebagai informasi, nama Dico muncul setelah survei dari Parameter Politik Indonesia dirilis, yang menempatkannya sebagai kandidat terfavorit untuk mendampingi Gibran jika Gibran maju di Pilgub Jateng. •IRY



“Rekomendasi Partai Gerindra resmi ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Ahmad Muzani, calon Gubernur Jatim dari Gerindra adalah Khofifah”

Anwar Sadad



# KHOFIFAH-EMIL DARDAK JILID II

**Untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024, Partai Gerindra tidak akan mengusung kadernya sendiri. Meskipun perolehan suara dan kursi untuk DPRD Jawa Timur hasil Pemilu 2024 naik secara signifikan.**

Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad, dengan tegas menyatakan bahwa partainya akan tetap mengikuti keputusan sebelumnya sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan, yaitu mengusung Khofifah Indar Parawansa sebagai bakal Calon Gubernur (Cagub) Jatim.

“Di hadapan beliau (Khofifah) saya sampaikan, rekomendasi Partai Gerindra resmi ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Ahmad Muzani, calon Gubernur Jatim dari Gerindra adalah Khofifah,” ujar Sadad.

Meskipun mantap dengan keputusannya, Sadad menekankan bahwa rekomendasi Gerindra hanya untuk Khofifah sebagai bakal cagub Jatim. Sementara rekomendasi untuk calon Wakil Gubernur Jatim yang akan mendampingi Khofifah, Gerindra masih belum membuat keputusan.

“(Rekomendasi) untuk gubernur saja. Soal wakil gubernur itu tergantung dinamika politik yang terjadi nanti,” tandas Sadad.

Dengan melihat perkembangan dinamika politik yang ada, kemungkinan besar Khofifah tidak akan berpasangan lagi dengan Emil Dardak seperti pada periode sebelumnya.

Terlebih lagi, sampai saat ini hanya Partai Demokrat yang telah mengeluarkan rekomendasi paket lengkap, Khofifah-Emil, untuk maju di Pilgub Jatim 2024. Sementara Gerindra, Golkar, dan PAN hanya merekomendasikan bakal cagub saja kepada Khofifah.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait, mengakui bahwa rekomendasi untuk Pilgub Jatim hanya diberikan kepada Khofifah Indar Parawansa. Fawait menegaskan bahwa partainya akan tunduk pada aturan dari DPP Partai Gerindra, karena Gerindra telah memberikan mandat kepada Khofifah Indar Parawansa untuk maju dalam Pilgub Jatim.

Ketika ditanya apakah Gerindra akan tetap mendukung koalisi Khofifah-Emil, Fawait menyebutkan bahwa hal itu merupakan kewenangan dari DPP Partai Gerindra.

“Kewenangan mengenai wakil gubernur

juga ada di tangan DPP Partai Gerindra,” kata Fawait.

Diketahui, Partai Demokrat berharap Khofifah Indar Parawansa kembali mengandeng Emil Dardak untuk maju dalam Pilgub Jatim pada bulan November 2024 mendatang.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Demokrat Jatim, Samwil.

Samwil menegaskan bahwa partainya kembali memberikan dukungan kepada Khofifah-Emil untuk maju dalam Pilgub dan hal ini sudah merupakan rekomendasi dari DPP Partai Demokrat.

“Rekomendasi dari DPP Demokrat, Mas Emil tetap akan mendampingi Bu Khofifah,” ujar Samwil.

“Rekomendasi dari Golkar sudah keluar, rekomendasi dari Demokrat juga sudah keluar,” tambah Samwil.

Keyakinan Samwil semakin kuat karena koalisi partai politik masih solid dalam Pilkada 2024.

“Koalisi partai masih solid, termasuk PAN, Golkar, dan Demokrat,” ujarnya.

Sementara, Khofifah Indar Parawansa telah mengonfirmasi niatnya untuk kembali bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang, sebagai cagub Jatim.

Ia juga telah memastikan bahwa Emil Elistianto Dardak akan menjadi pasangannya sebagai

calon wakil gubernur (cawagub) Jatim.

Hingga saat ini, Khofifah telah mendapatkan rekomendasi dari empat partai politik untuk maju kembali dalam Pilkada Jatim. Keempat partai tersebut adalah Golkar, PAN, Partai Demokrat, dan Gerindra.

Rekomendasi dari PAN diserahkan kepada Khofifah pada 4 Desember 2023 di Surabaya, di mana PAN menjadi salah satu partai yang memberikan rekomendasi pertama kali kepada Khofifah.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang memberikan rekomendasi tersebut. Sementara itu, Partai Gerindra memberikan rekomendasi melalui Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, pada tanggal 10 Desember 2023.

Rekomendasi dari Partai Demokrat disampaikan langsung oleh Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada tanggal 12 Desember 2023.

Tidak hanya dari PAN, Gerindra, dan Partai Demokrat, Khofifah juga mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Rekomendasi ini diberikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kepada Khofifah di

Sidoarjo.

Sebagai informasi, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak berhasil memenangkan Pilkada Jatim pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, pasangan Khofifah-Emil mendapatkan persentase sebesar 53,55 persen dengan total 10.465.218 suara.

Sementara itu, pasangan lawannya, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, memperoleh persentase sebesar 46,45 persen dengan total 9.076.014 suara.

Khofifah menjelaskan alasannya tetap memilih Emil Elestianto Dardak sebagai Cawagub di Pilgub Jatim 2024, karena sudah merasa nyaman berpasangan dengan Emil setelah lima tahun berpasangan di pemerintahan.

Selain itu, Emil juga dinilai sudah berpengalaman sebagai wakil gubernur. Sehingga Emil dibutuhkan untuk bisa membantu percepatan pembangunan di Jatim.

“Emil sendiri sudah memiliki banyak pengalaman sebagai wakil gubernur, jadi bisa membantu untuk percepatan pembangunan di Jawa Timur selama lima tahun kedepan,” ungkapnya.

Khofifah pun merasa kinerjanya bersama Emil untuk lima tahun kedepan akan lebih baik, karena sudah menemukan pola kerja yang sudah sesuai.

“Saya merasa sangat nyaman dengan Mas Emil, banyak hal yang masih butuh penguatan, percepatan-percepatan pembangunan,” tegasnya. ●IRY





“Siapa yang tidak tertarik dan tergiur menjadi wali kota. Apalagi saat Harnojoyo yang berkuasa 10 tahun tidak bisa lagi mencalonkan diri”

Ade Indra Chaniago

# INFO PILKADA

Minggu III • Maret 2024

9

## PILWAKO PALEMBANG BUKAN HANYA MILIK RATU DEWA DAN FITRI

**Tidak hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas, kini nama-nama beken muncul sebagai kandidat Calon Wali Kota (Cawako) Palembang 2024. Nama-nama tersebut kini semakin gencar tebar pesona sebelum secara resmi mendeklarasikan diri.**

**R**asyid Rajasa muncul sebagai penantang Ratu Dewa dan Fitrianti Agustinda (Finda), putra bungsu Hatta Rajasa itu sedang dipersiapkan oleh DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel sebagai calon potensial.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Selatan, Joncik Muhammad menyatakan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan pemimpin partai lain untuk berkoalisi dalam mendukung Rasyid.

“Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menyiapkan segala perlengkapan, kemudian kami akan meluncurkan beliau untuk maju dalam Pilkada Palembang,” ungkap Joncik Muhammad.

Joncik, yang juga disebut-sebut akan segera mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur Sumsel untuk mendampingi mantan Gubernur Sumsel, Herman Deru itu mengatakan bahwa awalnya dia yang mendorong Rasyid untuk maju dalam Pilwako Palembang.

“Saya yang awalnya mendorong karena kami melihat potensi yang dimiliki oleh beliau. Keluarga akhirnya setuju setelah kami berkomunikasi. Pak Hatta juga Insya Allah setuju untuk

segera maju di Palembang,” ujar mantan Bupati Empatlawang itu.

Menurut Joncik, hingga saat ini pihak-pihak telah berkomunikasi dengan beberapa partai politik agar Rasyid, yang diusung oleh PAN, bisa maju dalam Pilwako Palembang.

“PAN dapat berkoalisi dengan Gerindra, Nasdem, Demokrat, banyak partai lainnya. Semuanya masih dalam tahap pembahasan. Tetapi kami sudah berkomunikasi, termasuk dengan Bu Cici Gerindra, dan juga dengan Golkar,” tambah Joncik.

Joncik, memuji sosok Rasyid Rajasa sebagai pribadi yang luar biasa, rendah hati, dan memiliki latar belakang pendidikan dari luar negeri yang sangat baik, serta sangat berkomitmen.

“Dia sangat berkomitmen. Bayangkan, dia sudah tahu bahwa pacarnya menderita kanker, dan diprediksi tidak akan lama lagi, namun tetap menikah pada tahun 2017. Rasyid memiliki ketetapan hati yang kuat. Hingga sekarang, dia masih rutin ziarah ke makamnya (Adara Taista). Seorang sosok yang luar biasa, rendah hati, dan cerdas. Insya Allah, tidak akan mundur. Di DPP, beliau menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua,” ujar Joncik.

Sementara itu pengamat politik Sumsel, Ade Indra Chaniago, mengatakan Pilwako bukan hanya milik para per-

tahanan seperti Fitrianti Agustinda mantan Wakil Walikota (Wawako) Palembang dan Pj Walikota Palembang Ratu Dewa saja.

Lantaran akan banyak nama-nama yang bermunculan untuk tergiur menjadi orang nomor satu di Palembang dalam kompetisi Pilkada 2024 nanti.

“Siapa yang tidak tertarik dan tergiur menjadi Walikota! Apa lagi saat Harnojoyo yang berkuasa selama 10 tahun tidak bisa lagi mencalonkan diri karena dua periode disana mereka melihat ada peluang. Jadi nama-nama baru bermunculan untuk menjadi pesaing pertahanan seperti Finda dan Ratu Dewa,” kata dia.

Dia mencermati ada nama-nama yang telah muncul kepermukaan seperti Akbar Alfaro, Yudha Mahyudin, HNU, Syaiful Fadli, Charma Apriyanto, Prima Salam dan Rasyid Rajasa. Bahkan menurutnya lagi bisa saja nanti akan ada nama-nama baru yang lagi bermunculan baik maju dari jalur independen atau partai.

“Akbar Alfaro, Yudha Mahyudin, HNU, Syaiful Fadli dan Charma mereka-mereka ini sudah jauh-jauh hari lalu memasang banner di jalan mau maju Pilwako Palembang. Kalau terbaru Andi Asmara benar-benar memasang banner untuk maju. Sedangkan nama seperti Prima Salam dan Rasyid Rajasa baru sebatas rumor saja karena belum ada pergerakan seperti memasang banner untuk benar-tidaknya maju,” jelasnya Ade Indra

Chaniago menyebutkan para nama yang muncul untuk maju di Pilwako memiliki peluang yang sama walaupun elektabilitasnya belum besar dikenal warga Palembang seperti Ratu Dewa dan Finda.

“Bagi saya untuk maju itu juga harus memiliki strategi dan kekuatan mesin partai serta beragam intrik lainnya. Contohnya saja di Pilpres Prabowo dan Gibran bisa menang dengan Omon-omon dan Gemoy kalau mereka bisa melakukan tentunya juga akan bisa mengalahkan Finda dan Ratu Dewa,” jelasnya.

Dari sudut pandang lain Ade Indra juga menilai tidak akan mungkin semua calon-calon yang muncul namanya itu benar akan maju berkompetisi di pemilihan Walikota Palembang.

Dia menyebutkan kemungkinan besar mereka hanya melakukan survei secara tidak langsung untuk melihat peluang saja.

“Kalau saya lihat hanya cek ombak saja tidak semua calon akan maju. Sebab mereka ingin melihat seberapa tenar nama mereka saja. Tentunya kalau tidak tenar bagaimana mungkin mau maju hanya menghabiskan uang saja. Bisa jadi sebagai nama-nama muncul itu ingin dilirik oleh partai walaupun tidak dijadikan calon Wako bisa saja dilirik partai untuk dipasangkan dengan calon pilihan mereka menjadi calon Wawako,” paparnya.

Disinggung dari nama pertahanan Fitrianti Agustinda dan Pj Walikota Palembang Ratu Dewa siapa yang memiliki elektabilitas yang lebih tinggi. Menurut Rasyid Rajasa baru sebatas rumor saja karena belum ada pergerakan seperti memasang banner untuk benar-tidaknya maju,” jelasnya Ade Indra

“Kalau kata saya 11 12 imbang karena keduanya memiliki pendukung yang berbeda. Kalau untuk nama-nama baru yang benar-benar terlihat ingin mencalonkan diri sekarang ini HNU, Charma dan Andi Asmara karena benar-benar terlihat ada gerakan untuk mencalonkan diri. Sedangkan yang lain hanya cek ombak saja belum terlihat pasti,” pungkasnya.

• IRY





# HERMAN DERU-LURY ELZA ALEX PASTI MENANG

**Peta politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024 terus memberikan kejutan. Banyak nama kini bermunculan dan siap bertarung menuju Sumsel I.**

Mantan Gubernur Sumsel Herman Deru terus menjadi sorotan pasca ditinggal Mawardi Yahya yang resmi mendeklarasikan diri maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumsel menggandeng Harnojoyo, mantan Wali Kota Palembang.

Sosok pendamping Herman Deru masih menjadi teka-teki, ada beberapa tokoh yang digadang-gadang tengah dipersiapkan.

Setelah nama mantan Bupati Empat Layan, Joncik Muhammad yang ramai disebut akan menjadi pendamping Herman Deru, kini muncul nama Lury Elza Alex.

Beredar foto Herman Deru yang bersanding dengan Lury Elza Alex Noerdin, foto ini digadang-gadang akan tampil pada Pilkada Sumsel 2024 sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.

Foto ini ramai diperbincangan disejumlah grup whatsapp di Sumsel, duet Herman Deru dan Lury Elza Alex Noerdin cukup mengejutkan publik, sebab Alex Noerdin adalah salah satu rival di sejumlah momen Pilkada Sumsel.

Sebab, Lury Elza Alex Noerdin adalah putri dari Alex Noerdin mantan Gubernur Sumsel dua periode yang cukup familiar di tengah-tengah masyarakat, dengan sejumlah torehan prestasi Sumsel dikancah nasional hingga internasional.

Lury Elza Alex Noerdin, adalah kontestasi pileg 2024 diusung partai Partai Golongan Karya (Golkar)

salah satu partai yang mendulang suara terbanyak di Sumsel.

Golkar sendiri mendulang 749.718 suara dengan mendapat 12 kursi di DPRD Provinsi Sumsel, jumlah yang cukup subur untuk kursi wakil rakyat.

Lury Elza Alex SH putri bungsu dari Gubernur Sumsel periode 2008-2018, Alex Noerdin juga menjadi salah satu suara terbanyak pada wilayah Sumsel VI atau dapil 6.

Lury berhasil mengumpulkan suara sebanyak 22.058 suara dari total 88.262 suara yang diraih Partai Golkar pada dapil ini.

Pada dapil 6 terdapat 8 kursi dewan yang diraih, Partai Golkar meraih suara terbanyak dari seluruh partai pada dapil ini, meski suara Ismail Hairul dari partai Demokrat lebih banyak dari perolehan suara Lury.

Masuk di dunia politik, Lury pernah mengatakan karena ada tawaran dari Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, Bobby Adhityo Rizaldi.

Dirinya awalnya ragu namun sang ayah yakni Alex Noerdin juga telah menyerahkan semua kepadanya, soal keputusan untuk berpolitik.

Nah kali ini, Lury sunter dipasangkan dengan mantan Gubernur Sumsel Herman Deru, yang

disebut-sebut masih belum menentukan pilihan tentang pendamping pada Pilkada nanti.

Sosok Lury dinilai cukup mempunyai untuk disandingkan dengan Herman Deru, dan memiliki kaitan erat tentang politik yang dinamis.

Jika benar, Herman Deru bersanding dengan Lury Elza Alex dalam Pilgub Sumsel 2024 kemungkinan akan menang terbuka lebar.

Lury mendengar hal itu, memberikan tanggapan singkat, dia tidak terlalu mau membicarakan hal itu lebih jauh, namun tidak pula menentang hal itu.

“Politik ini cair, kita lihat saja nanti, last minute,” kata Lury dihubungi infosumsel. ID, Kamis 21 Maret 2023.

Duet Herman Deru dan Lury dinilai sejumlah pihak cukup menggemparkan dunia perpolitikan, sebab Alex Noerdin ayah dari Lury disebut-sebut sebagai rival politik disejumlah momen pemilu.

Herman Deru pernah bersaing dengan Alex Noerdi, saat itu Alex menang lagi kala berpasangan dengan Ishak Mekki.

Alex Noerdin-Ishak Mekki memperoleh sebanyak 1.405.510 suara, sedangkan Herman Deru-Maphilinda Syahrial Oesman (Derma) memperoleh sebanyak 1.258.240 suara.

Sementara, nama Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel, Joncik Muhammad dikabarkan akan menjadi Cawagub Sumsel mendampingi Herman Deru.

“Saya siap untuk mematuhi segala perintah dari partai. Saya juga sudah memberikan laporan kepada pimpinan pusat partai mengenai usulan Pilkada,” ungkap Joncik, Selasa 19 Maret 2024.

Joncik menjelaskan bahwa saat ini dia masih menantikan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN mengenai langkah selanjutnya, apa-

kah akan melanjutkan atau mengakhiri koalisi dengan TKN (Tim Kampanye Nasional).

Jika koalisi tersebut berakhir, maka kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai NasDem menjadi lebih terbuka.

“PAN sedang menanti keputusan dari koalisi, apakah akan tetap berada di level pusat hingga daerah atau apakah akan diserahkan kepada partai masing-masing,” jelasnya.

Sementara, Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar menyebut, ini hanya dagelan yang dibuat agar popularitas Herman Deru tetap naik. Pasalnya setelah tidak menjabat sebagai Gubernur Sumsel, nama Herman Deru sedikit meredup.

“Ini hanya dagelan politik saja dan penghinaan terhadap sosok Bapak Alex Noerdin, sangat tidak etis,” jelasnya.

Diketahui, kata dia, sebelum Noerdin nama Lury Elza banyak nama lain yang juga mencuat di media sosial seperti SN Prana Putra Sohe, Joncik Muhammad, Heri Amalindo dan sebagainya.

“Itu hanya untuk menjaga popularitas dan memancing respon publik sehingga elektabilitas HD tidak turun, tapi dengan Joncik mungkin serius dan akan segera deklarasi,” tegasnya.

Togar menyebut, Pilgub Sumsel ini akan lebih menarik. Pasalnya, kandidat yang

maju adalah para pejuang dan pemenang sehingga persaingan antar kandidat akan ketat sehingga Pilgub Sumsel ini akan berasa seperti Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Ini akan sangat menarik, Pilgub rasa Pilpres. Semua ini hanya strategi politik, jadi masyarakat harus cermat,” Pungkasnya. IRY





“Akan ada koalisi baru karena partai nantinya tercampur-campur. Sebab di Pilwako mencalonkan diri itu tergantung individu”

Husni Thamrin

# AKAN TERBENTUK KOALISI BARU DI PILWAKO PALEMBANG

**Kandidat Calon Wali Kota (Cawako) Palembang untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Palembang 2024 mencuatkan banyak nama, baik wajah lama maupun wajah baru yang secara tidak langsung siap bertarung.**

**M**eski hingga kini elektabilitas Ratu Dewa Pj Wali Kota Palembang dan Fitrianti Agustinda (Finda), mantan Wakil Wali Kota Palembang masih belum bisa disalip oleh kandidat lain.

Kini nama baru mulai digadang-gadang akan menggoyahkan petahana Ratu Dewa dan Finda. Sebut saja Rasyid Rajasa yang kini sedang disiapkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk maju sebagai Cawako Palembang 2024.

Putra bungsu Hatta Rajasa itu muncul setelah pernyataan resmi dari PAN yang menyiapkan kadernya untuk Pilkada 2024.

Meski demikian, dalam Pilwako Palembang ini tampaknya akan muncul koalisi baru, tidak sama dengan koalisi yang terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sehingga kemungkinan akan terjadi koalisi lintas partai.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Dr Muhammad Husni Thamrin mengungkapkan akan ada koalisi partai baru di Pilwako Palembang 2024 tidak hanya koalisi Pilpres saja.

Dicermati koalisi baru itu terbentuk karena Pilwako Palembang lebih mengutamakan individu dan mementingkan elektabilitas di mata masyarakat Palembang dibandingkan partai.

“Akan ada koalisi baru karena partai nantinya tercampur-campur. Sebab di Pilwako mencalonkan diri itu tergantung individu mereka merasa memiliki elektabilitas dan modal atau tidak. Sedangkan partai hanya sebagai perahu saja untuk bisa mencalonkan diri jadi koalisi besar di Pilpres tidak akan ada di Pilwako,”kata dia

Menurutnya partai akan menerima siapapun yang mau apabila pe-

nilaian elektabilitas individu itu benar-benar baik di mata masyarakat Palembang. Sebab partai tentunya juga akan mendapatkan nama dan meningkatkan nilai tersendiri.

“Kalau di daerah partai lebih ingin mendapatkan nilai jadi kalau ada individu yang memiliki elektabilitas tinggi merangkul mereka walaupun dari koalisi berbeda dipastikan akan terjadi koalisi baru tersebut,”jelasnya lagi

Dia mencermati koalisi besar di Pilpres tidak akan sepenuhnya terjadi di Pilwako Palembang, namun adanya koalisi Mawardi Yahya dan Harnojoyo antara Gerindra dan Demokrat baginya hanya kebetulan saja.

Sebab sekali lagi dia menilai Pilkada itu mementingkan elektabilitas individu bukan nama besar partai atau koalisi partai.

“Mawardi Yahya memilih Harnojoyo karena elektabilitasnya dinilai besar di Palembang kalau koalisi itu hanya kebetulan saja. Sebab Mawardi Yahya dari Gerindra di Sumsel memiliki peluang besar untuk maju apa lagi dia sebagai tim sukses di Pilpres kemarin mendapatkan peluang dari partai. Namun untuk menentukan Mawardi Yahya cocok bekerja sama dengan siapa semuanya tentunya dia sendiri yang memilih kebetulan Harnojoyo dari Demokrat,”jelasnya

Disisi lain adanya kemungkinan  
sosok

yang bakal ikut berkompetisi di Pilwako Palembang maju tanpa partai menggunakan jalur independen terbuka besar. Sebab ada nama Charma Apriyanto yang menyatakan akan maju sebagai Cawako dari jalur independen.

“Tidak hanya Charma bisa saja akan ada nama lain. Tetapi sebenarnya itu berat karena harus benar-benar mengeluarkan modal sendiri. Kalau pun nanti jadi juga akan sulit melakukan negosiasi untuk memilih jabatan di pemerintahan sebab dia harus bernegosiasi dengan partai politik di parlemen,”ucapnya

Menelusik banyaknya nama-nama yang sudah muncul disebutkan tidak akan semuanya maju. Dia menilai Pilwako di Palembang hanya akan berlangsung dengan 4 nomor pasangan saja.

“Kalau menurut saya hanya 4 pasangan saja tidak semuanya maju. Karena tidak akan semuanya benar-benar maju,”ceplusnya

Menurutnya dosen Unsri ini, sebenarnya masih terlalu pagi apabila menelusik koalisi partai. Lantaran di Pilwako Palembang sekarang ini masih terjadi perang elektabilitas untuk menunjukkan diri para calon dengan melihat popularitas mereka.

“Kalau bahas partai apa yang berkoalisi sebenarnya masih terlalu pagi sebab individu seka-

rang masih memunculkan diri. Setelah mereka memastikan elektabilitas tinggi baru mencalonkan diri dan mencari partai untuk menjadi perahunya. Nah disana kolasi baru akan terbentuk tidak hanya koalisi Pilpres saja semuanya akan tercampur-campur,”pungkasnya.

Bakal banyak kandidat yang akan berguguran dalam Pilwako Palembang 2024, nama-nama yang mulai mencuat seperti Ratu Dewa, Basyaruddin Ahmad, Yudha Pratomo, Akbar Alfaro, Fitrianti Agustinda, H Nasrun Umar, Rasyid Rajasa, Prima Salam, Safran Saropi serta Charta Apriyanto.

Semua kandidat dipastikan tidak akan maju semua melihat peta politik yang terjadi jelang Pilwako 2024, meski saat ini semua kandidat menyatakan siap sebagai Cawako Palembang.

Ditambahkan pengamat politik Sumatera Selatan M Haekal Al-Haffafah berpendapat kemunculan M Rasyid Rajasa yang didorong PAN punya peluang besar. Apalagi bila dipasangkan dengan Ratu Dewa atau Fitrianti Agustinda yang memiliki elektabilitas tertinggi dalam survei Pilkada 2024.

“Potensi Rasyid Rajasa berpeluang besar jika berpasangan dengan Ratu Dewa atau Fitrianti Agustinda yang memiliki survey tertinggi di menjadi Wali Kota Palembang,” katanya.

Untuk diketahui, Ratu Dewa untuk saat ini tidak memiliki kendaraan politik. Sementara Fitrianti Agustinda merupakan tokoh parpol.

“Di level middle ke bawah ada nama-nama Prima Salam, Syaiful Fadli, Basyaruddin Akhmad, Yudha Mahyudin, Charma, dan lain-lain. Hanya angka elektabilitasnya belum signifikan,”ungkapnya.●IRY





# DPR OGAH PINDAH KE IKN

## Usul Jakarta Kota Parlemen

**Pemerintah dan DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah tak lagi menjadi ibu kota karena pindah ke Nusantara. Dalam beleid tersebut, DPR tiba-tiba mengusulkan agar DKJ menjadi ibu kota parlemen atau legislatif.**

**W**akil Ketua Badan Legislasi DPR, Achmad Baidowi, menjelaskan, ibu kota parlemen dapat menjadi salah satu kekhususan Jakarta yang diatur dalam RUU DKJ. Apalagi, saat ini, penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara masih belum pasti, termasuk Gedung DPR di sana.

“Di Jakarta ini kita juga mengatur tentang kekhususan dan Jakarta masih ada kaitannya dengan IKN. Saya sempat berpikir begini tadi, kalau sekalian dibikin kekhususan bisa nggak? Misalkan, di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, parlemen,” ujar Baidowi dalam rapat Panitia Kerja RUU DKJ, Senin, 18 Maret 2024.

Awik, sapaannya, mengatakan, Gedung DPR dan aktivitas lembaga legislatif itu di IKN tetaplah ada. Namun, pusat kegiatan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran tetap ada di Jakarta.

“Tidak membiarkan pemerintah (sendiri) di situ (IKN), jadi aktivitas keparlemenan ada juga di situ, tapi fokusnya, pusatnya di sini (Jakarta),” ujarnya.

Diketahui, Baleg dan pemerintah sudah menyepakati daftar inventarisasi masalah (DIM) 572. DIM tersebut mengatur, kementerian/lembaga yang belum selesai dibangun di Jakarta, mereka tetap boleh menyelenggarakan tugasnya di Daerah Khusus Jakarta.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menjadi satu-satunya yang menolak pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU DKJ. Salah satu yang disoroti mereka adalah tak melihat adanya kekhususan dalam RUU tersebut untuk Jakarta.

Anggota Baleg Fraksi PKS, Ansory Siregar, pun mengusulkan agar Indonesia memiliki tiga ibu kota negara untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jakarta diusulkan menjadi ibu kota negara di sektor legislatif.

“Bisa dikaji kekhususan Jakarta sebagai ibu kota legislatif, IKN sebagai ibu kota eksekutif, dan kota lain sebagai ibu kota yudikatif. Sebagaimana yang dilakukan Afrika Selatan, dengan demikian menjadi jelas apa yang menjadi kekhususan Jakarta, bukan sekadar namanya,” ujar Ansory.

Anggota Komisi II DPR, Wahyu Sanjaya, mengusulkan gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di Ibu Kota Nusantara.

Wahyu mengatakan, pemerintah memiliki prioritas yang sangat besar dalam pembangunan IKN. Secara pribadi, dirinya ingin DPR menjadi lembaga yang mengalah atas prioritas pembangunan pemerintah itu.

“Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah, tetapi terakhir sekali saja itu,” kata Wahyu saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.

Menurutnya, DPR perlu memberikan prioritas pembangunan IKN kepada pemerintah, se-

hingga pembangunan gedung DPR di IKN dilakukan setelah seluruh gedung pemerintahan selesai dibangun.

Selain itu, Wahyu mengingatkan Otorita IKN agar tidak lupa menyiapkan sistem pemeliharaan kota IKN karena Otorita IKN hanya pihak koordinator yang menerima hasil pembangunan gedung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Jadi, mereka ini nggak tahu kondisi barangnya nanti, jadi diserahkan barang setelah itu baru dipelihara, jadi tolong diperhatikan nanti,” katanya.

Kemudian, dia juga meminta Otorita IKN untuk memperhatikan rencana detail tata ruang (RDTR) dalam pembangunan IKN. Jangan sampai, kata dia, IKN justru menjadi seperti kota besar lainnya yang mengalami kemacetan lalu lintas.

“Saya mengingatkan bahwasanya ini kota baru, jangan sampai tata ruangnya menjadi semrawut sehingga kita tidak bisa mengatur alur transportasi publik,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli, mengatakan berdasarkan pemantauannya terakhir, area yang akan dibangun Gedung DPR di IKN itu pun belum digarap. Artinya, pembangunan Gedung DPR di IKN bakal dilakukan pada tahap selanjutnya.

“Kalau tahap pertama ini kan sampai 2024, mungkin tahap kedua,” kata Doli.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan sikap berseberangan atas usulan itu. Sekretaris jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, meminta DPR ikut bersama pemerintah bersama-sama berpindah tugas ke IKN.

“Tentunya dengan tetap menghormati pendapat, izinkan pemerintah berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut pemerintah, jangan biarkan kami saja di sana. Kita bersama, pimpinan. Dalam konteks negara kesatuan,” kata Suhajar.

Suhajar menambahkan, dalam rumusan baru yang diusulkan pemerintah telah ditegaskan bahwa perpindahan DPR ke IKN dapat disesuaikan dengan kesiapan prasarana dan sarananya. Artinya, perpindahan kegiatan eksekutif dan legislatif dilakukan secara bertahap.

“Sebenarnya dalam rumusan yang telah dibuat pemerintah, itu menurut kami sudah tertampung. Dalam rangka mendukung kelancaran perpindahan ibu kota secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara dan organisasi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di ibu kota negara, masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Jakarta, sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan presiden,” kata Suhajar. •RDO





“Saya sangat yakin jikalau dilaksanakan dengan sasaran 100 persen, maka defisit APBN akan meningkat, bisa impeachment. Maka dari itu, saya juga yakin pelaksanaan enggak akan 100 persen hingga 2029 nanti”

*Nailul Huda*

# SRI MULYANI ENGGAK URUS MAKAN SIANG GRATIS

**Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara tegas menolak berbicara terkait program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.**

Program tersebut santer dibicarakan karena kalangan pemerintah lainnya menyebutkan telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani dengan nada bicara serius menjawab bahwa dirinya tidak dapat mengomentari program tersebut karena memang tidak ada dalam APBN 2024.

“Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum ada, di 2024 kan tidak ada. Kalau ini adalah untuk pemerintahan baru, bapak ibu sekalian paham bahwa siklus APBN kami nanti dari KEM-PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal),” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, Selasa, 19 Maret 2024.

Sri Mulyani juga secara tegas menjawab bahwa adanya isu sumber-sumber dana makan siang gratis bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidaklah benar. Dirinya menekankan akan menunggu pemerintahan baru yang akan diumumkan KPU pada 20 Maret 2024 dan berdiskusi dengan presiden pengganti Jokowi terkait APBN 2025.

“Jangan lupa ini pemerintah transisi, kami akan membantu untuk mendesain APBN transisi dengan etikanya ya kita komunikasi dengan pemerintah baru. KPU belum putus. Kami ini masih tunggu official KPU sampaikan siapa kemudian pemerintah baru siapa,” tegasnya.

Sesuai dengan linimasa penyusunan APBN, saat ini pemerintah tengah membuat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar postur APBN 2025. Nantinya, KEM-PPKF akan disampaikan kepada DPR pada akhir Mei, kemudian membahas Rancangan APBN (RAPBN) pada pada Juni, yang pada akhirnya akan disampaikan oleh Presiden saat Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.

Sejauh dalam pembahasan KEM-PPKF dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, Sri Mulyani menyebutkan belum

ada membahas terkait makan siang gratis. Dirinya bahkan meminta maaf kepada anggota Komisi XI yang hadir karena belum dapat menjawab pertanyaan yang juga menjadi keresahan masyarakat.

“Mohon maaf sekali bapak/ibu, apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, saya nggak bisa komentar makan siang gratis,” tuturnya sambil menyatukan kedua telapak tangan.

Bukan kali pertama Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menolak berkomentar terkait makan siang gratis. Sebelumnya, saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu pun, Sri Mulyani menyebut bahwa tidak mengurus soal makan siang gratis. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menjelaskan hingga saat ini hal-hal mengenai APBN masih terus dikomunikasikan. Penyebabnya, belum ada perhitungan yang pasti akan seperti apa rancangan APBN untuk pemerintahan selanjutnya.

“Jadi ya ini paralel semuanya sedang di dalam komunikasi. Karena belum ada nanti hitung-hitungan yang benar-benar desainnya akan seperti apa, aku enggak bisa ngomong juga,” jelasnya.

Sementara terkait PPN 12 persen, di mana pemerintah telah merencanakan kenaikan pajak ini yang termaktub dalam Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, tercantum ketentuan terbaru terkait tarif PPN. Di mana tarif PPN naik 1 persen menjadi sebesar 11 persen yang telah mulai berlaku sejak 1 April 2022. Sementara tarif PPN sebesar 12 persen harus berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Meski demikian, Sri Mulyani akan menghormati pemerintahan baru jika nantinya belum akan menggunakan tarif 12 persen tersebut. “Jadi kalau (pemerintahan baru) PPN-nya tetap 11 persen, ya pasti nanti disesuaikan target penerimaannya dengan UU HPP, nanti akan dibahas,” ungkapnya.

#### Masih Mimpi

Sejumlah ekonom meyakini bahwa program

makan siang gratis seakan masih menjadi mimpi di siang bolong karena akan memberikan beban berat bagi penggunaan APBN mendatang.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menilai, nyaris tidak ada celah fiskal saat ini yang bisa digunakan untuk program makan siang gratis. Apabila program ini benar-benar dipaksakan dengan mengambil skema utang, maka akan membuat defisit APBN per PDB melebihi ambang batas 3 persen.

“Saya sangat yakin jikalau dilaksanakan dengan sasaran 100 persen, maka defisit APBN akan meningkat, bisa impeachment. Maka dari itu, saya juga yakin pelaksanaan enggak akan 100 persen hingga 2029 nanti,” ujarnya, Sabtu, 16 Maret 2024.

Meski begitu, dia mengatakan saat ini jika program tersebut masih ingin direalisasikan, maka Kementerian Sosial dinilai sudah cocok untuk menjadi motor dari program yang dimiliki pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu.

“Koordinasi nanti di bawah Kemenko PMK. Tidak perlu untuk bikin lembaga atau badan baru karena sangat tidak efektif jika di bawah Kementerian atau

Lem - b a g a

baru,” kata Huda.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai, Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakan lembaga yang cocok untuk memotori program makan siang gratis apabila akan direalisasikan. Penyebabnya, dia menilai bahwa semua urusan pangan, termasuk makan siang gratis, harus di bawah kendali badan pangan nasional.

Tentunya, terdapat tiga pertimbangan dalam menjalankan program dari pasangan Prabowo-Gibran itu. Pertama, dia menilai bahwa dari sisi ketersediaan bahan pangan jangan sampai nantinya program andalan Prabowo-Gibran ini justru menimbulkan perebutan antara program makan siang gratis dengan kebutuhan masyarakat.

“Badan pangan perlu hindari efek inflasi dari program makan siang gratis,” ujarnya, Selasa, 12 Maret 2024.

Kedua, dia melanjutkan bahwa secara teknis meskipun melibatkan instansi sekolah, sehingga akan lebih masuk akal apabila dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Namun, dia menekankan bahwa program utama tersebut tetapi berkaitan dengan bahan makanan sebaiknya diatur badan pangan. Apalagi, koordinasi dengan pihak teknis pun dapat dilakukan lewat rapat koordinator. Sehingga, Kemendikbudristek tidak perlu turun tangan secara langsung untuk mengurus program itu.

Ketiga, Bhima mengatakan bahwa kebijakan satu pintu di badan pangan dapat menghindari biaya pengawasan yang terlalu mahal dan menghindari celah korupsi. Mengingat APBN dinilai dalam situasi yang sulit dalam menerapkan program makan siang gratis.

“Defisit APBN diproyeksi bisa di atas 3—3,25 persen jika makan siang gratis memakan anggaran terlalu besar dengan asumsi rasio pajak tetap di kisaran 10—11 persen, dan realokasi anggaran tidak dilakukan secara efektif,” ucapnya. • RDO



“Kita juga jangan terlibat dalam konspirasi untuk meloloskan atau tidak meloloskan dugaan pelanggaran. Karena ada data, cuma karena ada konspirasi, yang punya data ini dikeroyok oleh saksi-saksi lain”

*Totok Hariyono*



# EVALUASI PEMILU MENUJU PILKADA 2024

**Dalam melakukan tugas kerja-kerja pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan upaya evaluasi. Hal ini guna mempersempit gap antara teks (prosedur dan peraturan) dengan realita atau keadaan yang terjadi di masyarakat.**

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengungkapkan, perlunya untuk mengatasi gap atau perbedaan antara prosedur dengan realita bisa teratasi. Dia mencontohkan dalam masa kampanye yang selalu menjadi subjek ada gap atau perbedaan antara teks sebagaimana tertuang dalam peraturan dengan konteks yang terjadi di lapangan.

“Kita coba mempersempit gap tersebut sesuai dengan praktik dan realita sebagai evaluasi Pemilu 2024, sekaligus menjadi batu pijak pengawas untuk Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 yang sebentar lagi akan dijalani,” kata Lolly saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Kampanye, Hasil Rekapitulasi, dan Konsolidasi Pengawasan Pada Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Lolly menambahkan, dalam melakukan pencegahan dan mengembangkan partisipasi masyarakat mengawasi pemilu maupun pemilihan dapat melekatkan dengan akar budaya. “Partisipasi masyarakat harus lekat dengan kebudayaan. Divisi pencegahan juga melakukan pendekatan budaya yang kuat,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, perlu memperkuat kerja sama kelembagaan dengan kerja sama seluruh pengawas pemilu. “Kita harus menghapus sekat antardivisi, antara komisioner dengan sekretariat. Memang ada tugas masing-masing yang berbeda, namun jangan terpisah oleh sekat,” serunya.

Dia pun berpesan pe- serta yang

merupakan pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dapat menyerap pengetahuan dari para narasumber. “Salah satunya pandangan kritis masyarakat sipil terhadap demokrasi dan pengawasan pemilu. Manfaatkan ilmu dari para narasumber yang kaya akan pengalaman, kaya akan pengetahuan, dan kaya akan kebijaksanaan,” ungkapnya.

Kepala Subkoordinator Partisipasi Masyarakat, R Alief Sudewo, mengungkapkan, dalam tahapan kampanye, Bawaslu telah melakukan 90.716 upaya pencegahan dan 126 dugaan pelanggaran konten internet (siber) terkait pemilu, serta menangani 70 dugaan pelanggaran pemilu.

Dia menambahkan, untuk tahapan rekapitulasi perhitungan suara, posisi Bawaslu juga menjadi penting. Mencermati proses rekam yang dilakukan di tingkat nasional, sambungnya, masih ditemukan beberapa keberatan dari para saksi dan perbedaan data hasil yang ditampilkan dengan formulir model C, Hasil dengan Sirekap.

“Atas beberapa masalah tersebut, Bawaslu membuka akses penanganan pelanggaran bagi para pihak yang merasa berkeberatan. Serta pada bagian lain, upaya penguatan fungsi pengawasan juga dikembangkan dengan menguatkan partisipasi masyarakat,” sebutnya yang mewakili Deputi Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni.

Sementara itu, Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, mengatakan, jajaran Bawaslu daerah harus bersiap melakukan pengawasan tahapan Pilkada Serentak meskipun saat ini masih menyisakan tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu disampaikan Herwyn saat membuka Rapat Penyusunan Mekanisme Evaluasi Pengawas Adhoc dalam Pemilihan Serentak 2024, Selasa, 19 Maret 2024.

“Kerja-kerja kita terbagi dua, menyelesaikan proses Pemilu 2024 di MK, tapi di sisi lain saat bulan Mei, sudah berjalan verifikasi faktual untuk calon kepala daerah,” kata Herwyn.

Terkait tahapan waktu yang berisiran tersebut, Herwyn meminta jajaran Bawaslu daerah harus memastikan pengawasan terhadap kedua proses itu berjalan lancar. Dia meminta jajaran Bawaslu daerah melakukan komunikasi intens dengan Bawaslu agar dapat membantu

memberikan arahan.

“Coba bayangkan, bapak/ibu sekalian belum selesai tahapan pemilu, sudah harus melakukan pengawasan pemilihan. Tapi bapak/ibu harus siap,” tegasnya.

Dia juga berharap, dalam forum itu, jajaran Bawaslu daerah dapat membantu merumuskan format rekrutmen model pengawas adhoc dalam pemilihan serentak.

Selanjutnya, Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, meminta kepada jajaran Bawaslu daerah untuk mempersiapkan bahan keterangan tertulis demi menghadapi persidangan di MK.

Dia mengatakan bahan awal untuk semua tahapan seperti kampanye, pungut hitung, dan rekapitulasi suara sudah perlu dipersiapkan mulai dari sekarang dan tertulis di laporan hasil pengawasan.

“Ketua dan PIC (person in charge) setiap tahapan bertugas untuk mengatur bahan-bahannya. Jadi ini mengingatkan di sela-sela kesibukan harus juga mengumpulkan bahan-bahan keterangan tertulis. Dan itu sudah dikompilasi sesuai dengan templat yang sudah diberikan,” katanya dalam Rapat Sosialisasi Petunjuk Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

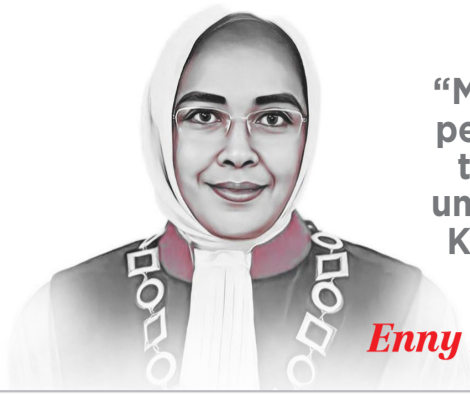
Totok menambahkan, bahan-bahan yang sudah disiapkan harus dipisahkan berdasarkan tahapan dan secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Hal ini ditujukan untuk mempermudah dalam pencarian data dan merapikan saat sidang di MK.

Selain itu, Totok juga mengingatkan agar Bawaslu di daerah pada setiap tahapan agar tidak terjadinya permasalahan yang muncul. “Kita juga jangan terlibat dalam konspirasi untuk meloloskan atau tidak meloloskan dugaan pelanggaran. Karena ada data, cuma karena ada konspirasi yang punya data ini dikeroyok oleh saksi-saksi lain. Itu nanti residunya akan sampai ke Bawaslu,” ujarnya.

Totok menegaskan, puncak dari demokrasi adalah mengkonversi suara menjadi kursi, sehingga fungsi Bawaslu adalah menjaga suara tersebut tetap pada hitungan normanya dan tidak bergeser.

“Tidak ada gunanya jadi Bawaslu kalau kita tidak bisa menjaga ini, apalagi kita terlibat dalam menaikkan atau menurunkan suara,” tandas Totok. ● RDO





“MK sudah siap menerima perkara yang masuk, dihitung tiga hari setelah diumumkan hasil rekap oleh KPU untuk PHPU Pilpres”

Enny Nurbaningsih

INFO  
KPU

Minggu III • Maret 2024

15

# KPU SIAP BERTAHAN HADAPI GUGATAN DI MK

**Rekapitulasi dan penetapan perolehan suara Pemilu 2024 rampung dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditandai dengan penandatanganan Keputusan KPU Nomor 360/2024 pada Rabu malam, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.**

Dengan berakhirnya tahapan tersebut, KPU segera menghadapi sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Pendaftaran perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK sendiri sudah dapat diajukan peserta pemilu setelah pukul 22.19 atau setelah hasil Pemilu 2024 ditetapkan oleh KPU. Peserta pemilu memiliki waktu 3x24 jam untuk mengajukan perkara PHPU ke MK.

“Sejak saat itu (22.19 WIB), 3x24 jam peserta pemilu yang akan mengajukan komplain keberatan atau sengketa terhadap hasil pemilu, terhitung sejak itu mulai mendaftarkan diri ke MK,” ujar Ketua KPU, Hasyim Asy’ari.

Menurut Hasyim, pihaknya juga segera mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi berbagai macam potensi sengketa yang dibawa ke MK. Ia mengatakan, kehadiran KPU di MK nantinya merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga tersebut dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

Terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari tahapan awal sampai hari ini, Hasyim mengatakan pihaknya sudah berikhtiar sekuat mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kendati demikian, catatan keberatan selama proses rekapitulasi penghitungan suara menjadi hal yang tidak dapat terelakkan bagi KPU.

“Yang bisa jadi itu menjadi bagian dari berpotensi untuk dilakukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Selain KPU, persiapan menghadapi sengketa di MK juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyebutkan sudah memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan data pelanggaran dan laporan hasil pengawasan, baik sebelum, selama, maupun sesudah hari pemungutan dan penghitungan suara.

“Yang berkaitan dengan permasalahan di rekapitulasi kemarin, yang kemudian diindikasikan melibatkan penyelenggara, misalnya, itu juga kita sedang usut untuk kita telusuri untuk

ditindaklanjuti,” ungkap Bagja.

Sebelumnya, anggota sekaligus Koordinator Divisi Hukum KPU, Mochamad Afifuddin, mengatakan pihaknya telah membentuk tim penyelesaian PHPU di MK untuk Pilpres dan Pileg.

“Tim dari KPU terdiri atas tim internal di jajaran KPU dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota dan tim eksternal yaitu kuasa hukum atau lawyer,” kata Afif, Kamis, 7 Maret 2024.

Menurut Afif, KPU juga melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai kejadian-kejadian di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Adapun skema penanganan yang disiapkan KPU adalah dengan melakukan gelar perkara terhadap permohonan yang diajukan pemohon.

Afif memastikan, pihaknya melakukan persiapan sedari awal dalam menghadapi PHPU dengan menyiapkan tim internal dan eksternal, melakukan bedah permohonan, serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) internal untuk manajemen penanganan perkara PHPU di MK.

“Posisi kita, bertahan pada siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan.

Nah, kita bertahan atau menunjukkan bukti-bukti untuk meyakinkan bahwa yang kita lakukan sudah sesuai aturan,” terangnya.

Sementara itu, Hakim MK, Enny Nurbaningsih, menyatakan pihaknya bersiap menggelar sidang PHPU. Enny mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan untuk menggelar sidang sengketa hasil pemilu setelah KPU mengumumkan hasil perolehan suara Pemilu 2024.

Persiapan MK, kata dia, sama seperti pada lima tahun yang lalu, hanya semakin lebih baik penguatan kapasitasnya.

Dia menuturkan, persiapan

mulai bisa dilihat dari bagian penerimaan berkas. Selain itu, supporting system kepaniteraan juga mulai piket malam ini.

“MK sudah siap menerima perkara yang masuk, dihitung tiga hari setelah diumumkan hasil rekap oleh KPU untuk PHPU Pilpres,” ujar Enny, Rabu, 20 Maret 2024.

Berdasarkan jadwal yang dibuat, MK hanya membutuhkan waktu 10 hari kerja untuk menangani perkara PHPU Pilpres 2024. Padahal, Pasal 475 Ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu dan Pasal 74 Ayat (3) Huruf a UU 7/2020 tentang MK mengatur bahwa waktu penyelesaian sengketa hasil pilpres paling lama 14 hari. Hari yang dimaksud adalah hari kerja.

Mengacu pada Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada Lampiran II, MK membuka pendaftaran tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU.

Pemohonan yang masuk dijadwalkan untuk dicatat dalam e-BRPK (Buku

Registrasi Perkara Konstitusi) pada 25 Maret

mendatang, dengan catatan

menyesuaikan dengan

penetapan hasil pemilu

oleh K P U .

Batas waktu

penyelesaian

perkara P H P U

selama 14 hari kerja

dihitung sejak permohonan sengketa diregistrasi atau dicatat dalam e-BRPK.

Masih dalam Lampiran II PMK 5/2023, MK juga telah menetapkan agenda sidang pemeriksaan pendahuluan guna mengecek kelengkapan serta kejelasan materi permohonan, sekaligus memeriksa dan mengecek alat bukti dilakukan pada 28 Maret 2024.

Sidang selanjutnya adalah mendengarkan jawaban KPU, pihak terkait (pasangan calon yang dinyatakan memperoleh suara terbanyak oleh KPU), pemberi keterangan seperti Bawaslu berlangsung dari 2 April hingga 5 April atau selama empat hari.

Lalu, MK mengagendakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan pengambilan keputusan pada 8-15 April. Adapun pengucapan putusan dijadwalkan pada 16 April.

Mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855, 3, dan 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, tanggal 8, 9, 12, dan 15 diputuskan sebagai hari cuti bersama.

Artinya, apabila pengucapan putusan tetap dilakukan pada 16 April seperti yang sudah dijadwalkan oleh MK, lembaga tersebut hanya menggunakan waktu 14 hari kerja yang diberikan undang-undang menjadi 10 hari kerja.

Enny mengungkapkan, jadwal yang ada di lampiran II PMK 5/2023 belum disesuaikan dengan libur nasional ataupun cuti bersama dalam rangka hari raya Idul Fitri. Sebab, saat PMK dibuat, belum ada kejelasan kapan libur nasional tersebut.

“(Hal itu) Sudah dibahas, hanya belum diterbitkan revisi lampirannya,” kata Enny.

Ketua Majelis Kehormatan MK, I Dewa Gede Palguna, mengungkapkan, tidak ada masalah jika lampiran II PMK 5/2023 yang memuat jadwal penanganan perkara PHPU pilpres direvisi. Apalagi revisi yang dibutuhkan hanya revisi minor.

Menurut Palguna, tanpa revisi pun, PMK itu sebenarnya tidak salah. Sebab, ketentuan 14 hari kerja tersebut merupakan batas waktu maksimal atau paling lama bagi MK untuk menangani perkara PHPU pilpres.

Hanya saja, ia juga sepakat bahwa waktu 14 hari untuk menangani

sengketa hasil pilpres terlalu cepat. Sebab, meskipun perkaranya hanya satu, misalnya, daerah pemilihan pemilu presiden adalah seluruh Tanah Air, bahkan hingga ke luar negeri.

“Khawatirnya, kalau kurang waktunya, tidak seluruh dalil atau bukti bisa dipertimbangkan. Itu bisa jadi persoa-



KETUA KPU

“Kita juga siapkan audiensi ke Pak Menteri, minimal Pak Dirjen. Dibuatkan surat saja ke Pak Menteri terkait pembangunan jalan tol yang sampai sekarang belum berjalan”

*Agus Fatoni*



# DORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN TOL BETUNG-BAYUNG LENCIR



**Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mendukung percepatan pembangunan Tol Betung-Bayung Lencir di Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).**

**D**ukungan itu disampaikan Agus Fatoni saat menerima laporan dari Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan tentang progress pembangunan jalan tol.

Ia mengapresiasi Pemkab Muba dibawah kepemimpinan Pj Bupati Apriyadi yang sangat getol memantau kondisi realisasi progress pembangunan jalan tol.

Dilaporkan Apriyadi menyampaikan progres pembangunan tol yang melintas Kabupaten Muba sepanjang 132 kilometer. Saat ini perkembangan pembangunan Tol Bayung Lencir-Tempino sudah mencapai 60-70 persen secara fisik.

Namun, hingga saat ini perkembangan pembangunan Tol Betung-Bayung Lencir baru masih tersendat, salah satunya dikarenakan proses pelepasan lahan yang belum mencapai 100 persen. Kemudian, Apriyadi juga menyampaikan terkait surat dari Kementerian PU untuk permohonan Penetapan Lokasi (Penlok) kepada Pemerintah Provinsi Sumsel yaitu melalui Gubernur Sumsel akan berakhir pada 6 April mendatang.

“Surat secara administrasi sudah diantar ke Pemprov kami sampaikan lisan sekarang ke Pak Gub. Kami minta arahan ke Pak Gub terkait jalan tol tersebut,” kata Apriyadi.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat

(Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mendukung percepatan proses pembangunan Tol Betung-Bayung Lencir. Dia meminta untuk segera bersurat kepada pejabat terkait agar pembangunan tersebut segera dilanjutkan.

“Di dalam surat tersebut mungkin perlu disebutkan batas April kalau tidak diputuskan

itu harus diulang kembali. Kalau nggak ada perpanjangan langsung itu perlu proses ulang,” ucap Fatoni.

Fatoni juga meminta agar segera dibuatkan surat tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Sekretariat Presiden (KSP) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dilaku-

kan audiensi membahas proses pembangunan tol tersebut.

“Kita juga siapkan audiensi ke Pak Menteri, minimal Pak Dirjen. Dibuatkan surat saja ke Pak Menteri terkait pembangunan jalan tol yang sampai sekarang belum berjalan. Memang harus serius ini, kalau bisa minggu ini atau minggu depan kita segera audiensi,” jelas Fatoni.

Pj Bupati Apriyadi mengatakan, pihaknya berharap agar proses pembangunan jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu) – Tempino – Jambi yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin bisa on the track dan selalu didukung maksimal oleh Pj Gubernur Sumsel.

“Kalau ada persoalan di lapangan, kami juga segera melapor ke pak Pj Gubernur Sumsel agar bisa teratasi dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya Pj Bupati Apriyadi Mahmud memberikan warning kepada seluruh pihak terkait terhadap pembangunan jalan Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu) – Tempino – Jambi yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin.

“Saya minta kepada semua pihak terkait untuk melakukan realisasi percepatan pembangunan jalan tol sesuai dengan tupoksi masing-masing,” tegasnya.

Progress pembangunan jalan harus terus dikebut terlebih persoalan Pengadaan Lahan Trase Tol Ruas Betung (Sp.Sekayu) – Tempino – Jambi.

“Kalau ada hambatan segera koordinasikan, khususnya pihak BPN terkait pengadaan tanah,” tegasnya lagi.

Ia menyebutkan, bahwasannya realisasi pembangunan jalan tol merupakan dampak banyak masyarakat.

“Jadi kita harus pro aktif, dan semata-mata demi kepentingan masyarakat,” ucapnya. ● RDR



“Kita ingin Palembang seperti Solo dan Bogor yang sukses dengan BTS-nya. Sebab Palembang ini termasuk kota besar layaknya Jakarta dan Bandung”

*Budi Karya Sumadi*

# DUKUNG OPTIMALISASI PEMANFAATAN ANGKUTAN UMUM DAN LRT

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Agus Fatoni berkomitmen mendukung optimalisasi Buy The Service (BTS) dan Light Rail Transit (LRT) Palembang. Komitmen itu disampaikan Agus Fatoni dalam rapat bersama Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi secara virtual.

“Optimalisasi ini kita wujudkan dengan mempersiapkan anggaran yang diperlukan. Juga mendukung kebijakan dimana perlu ada kebijakan dari Pemprov dan Pemkot Palembang agar angkutan feeder dan LRT bisa digunakan masyarakat dengan nyaman dan bermanfaat,” kata Fatoni.

Selain itu, Pemprov Sumsel juga mengusulkan sejumlah hal kepada Menhub. Di antaranya terkait penambahan feeder dan rerouting BTS kemudian jika masih belum terdapat rute feeder maka akan menggunakan bus medium guna menekan biaya operasional.

Nantinya, Pemprov Sumsel akan berkoordinasi dengan BUMN maupun pelaku usaha melalui CSR masing-masing guna menambah feeder. Melalui kesempatan ini, Fatoni juga menyoroti kawasan Jakabaring yang akan dilakukan pengembangan oleh Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang.

“Perlu penambahan tempat parkir di beberapa kawasan seperti di RS Siti Fatimah, Cinde dan Jakabaring,” imbuhnya.

Kedepannya untuk program jangka panjang, akan dilakukan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di LRT Ampera. Program tersebut tengah digencarkan oleh Pemkot Palembang melalui pembangunan taman-taman kota guna meningkatkan penumpang agar tertarik ke kawasan Ampera.

“Ini agar LRT juga bisa menjadi tujuan wisata transportasi saat berkunjung ke Palembang, seperti layaknya Ampera atau museum Al Quran yang selalu menjadi tujuan wisata ketika berkunjung ke Palembang,” harapnya.

Tak hanya itu, perlu upaya masif dalam mempromosikan LRT kepada pelajar dan mahasiswa bahwa angkutan massal di Palembang sudah sangat bagus dan modern. Selanjutnya, dia mengimbau kepada para pegawai baik instansi pemerintah/swasta untuk menggunakan LRT guna meningkatkan jumlah penumpang LRT ke depannya.

“Sosialisasi LRT secara masif penting



dan akan dilakukan lebih maksimal. Selain itu saat ini telah ada pemenang tender untuk pemasangan tiang-tiang,” kata Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Menhub RI Budi Karya mengaku dirinya akan mengawal progres LRT dan feeder yang beroperasi di Kota Palembang. Hal ini tak lain untuk menjadikan kota Palembang sebagai kota percontohan transportasi di Indonesia sebagaimana kota besar lainnya.

“Kita ingin Palembang seperti Solo dan Bogor yang sukses dengan BTS-nya. Sebab Palembang ini termasuk kota besar layaknya Jakarta dan Bandung,” ujar Budi.

Saat ini, terdapat tujuh feeder yang

ini akan membawa dampak yang baik bagi Kota Palembang.

## Percepat Kawasan LRT Ampera

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni juga mendorong percepatan proyek pengembangan kawasan Light Rail Transit (LRT) Ampera Palembang. Menurutnya, proyek tersebut sangatlah strategis dan penting untuk segera dioptimalkan percepatannya.

“Pemprov Sumsel akan mendukung dan melakukan langkah-langkah persiapan. Kecepatan pengembangan LRT kawasan Ampera tergantung dari kita semua. Untuk itu segera tuntaskan permasalahan yang

APBD, ataupun swasta, pun dengan besarnya masing-masing. Semua ini harus jelas”, ujarnya.

Executive Director Millennium Challenge Account (MCA) Indonesia II Maurin Sitorus mengatakan kedatangannya untuk mendiskusikan progres proyek option analysis dan feasibility study pengembangan kawasan LRT Ampera. Di mana pengembangan proyek LRT ini merupakan program hibah compact yaitu program hibah yang tidak konvensional.

Proyek pengembangan kawasan stasiun Ampera-LRT Palembang bertujuan untuk meningkatkan ridership LRT di kota Palembang melalui peningkatan integrasi antar stasiun LRT Ampera dengan bangunan di sekitarnya.

“Meningkatkan integrasi LRT dengan moda transportasi umum lainnya, yaitu angkot, perahu sungai dan Trans Musi. Meningkatkan potensi kawasan stasiun LRT sebagai destinasi pariwisata dan pengelolaan sirkulasi dan parkir kendaraan pribadi yang lebih baik,” jelasnya.

Maurin menyebut kawasan Ampera ini sering menjadi destinasi pengunjung. Wilayah ini sangat ramai, di antaranya Pasar 16 Ilir dan Masjid Agung. Menurutnya, banyak hal yang masih bisa dimaksimalkan di wilayah ini.

“Untuk pengembangan kawasan ini tentu saja kepemilikan lahan harus clear and clean saat pengembangan kawasan. Stasiun LRT Ampera sebagai inti keterhubungan kawasan melalui elevated pedestrian (skywalk) dan pedestrian serta penambahan fungsi baru dalam kawasan dalam menaikkan potensi keekonomian dan tourism destination,” ujarnya.

Pengembangan LRT kawasan Ampera tidak akan mengganggu kawasan terbuka di sekitar Ampera. Direncanakan nantinya akan dibangun gedung penghubung stasiun yang bentuknya menyerupai pempek adaan sebagai ikon Kota Palembang. ●RDR



beroperasi di Kota Palembang, lima di antaranya dibantu oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan dua lainnya oleh Pemkot Palembang. Oleh karena itu, Menhub meminta feeder tersebut dirawat dengan baik.

“Kota Palembang memperoleh subsidi paling banyak dari Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat berupa bantuan feeder dan BTS,” tambahnya.

Selain itu, Menhub juga menyambut baik jika LRT dijadikan tujuan wisata transportasi di Kota Palembang. Menurutnya, hal

ada di bagian kita masing-masing,” kata Fatoni dalam diskusi progres proyek option analysis dan feasibility study pengembangan kawasan Light Rail Transit (LRT) Ampera Palembang.

Fatoni merasa bersyukur Provinsi Sumsel bisa terpilih untuk mengembangkan kawasan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya tentu harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Terkait pendanaannya juga harus jelas. Apakah menggunakan dana dari APBN,

“Pada bulan Mei curah hujan akan berkurang di Sumatera. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, September harap diwaspadai akan terjadi potensi Karhutla di Sumsel, Riau, dan Kalteng”

*Hadi Tjahjanto*



# AGUS FATONI SIAPKAN ANTISIPASI KARHUTLA

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan telah menyiapkan berbagai antisipasi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2024. Meski saat ini masih memasuki musim hujan namun kesiapsiagaan serta antisipasi perlu dilakukan sedini mungkin agar tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Berbagai antisipasi telah disiapkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni yang dipaparkan di Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta.

Rakorsus Antisipasi Karhutla sendiri dihadiri sejumlah menteri, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Kemudian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga para pimpinan lembaga/badan, serta diikuti kepala daerah yang wilayahnya



pola pada tahun lalu dengan tetap meningkatkan dan mengoptimalkan sejak awal sehingga penanganannya bisa lebih efektif lagi,” jelas Fatoni.

“Tahun lalu kita mendapatkan apresiasi dari KLHK dalam penanganan karhutla, untuk itu tahun ini tentu kita akan lebih baik,” sambungnya.

Kemudian, Fatoni juga menyampaikan rekomendasi bagi pemerintah pusat terkait penanganan karhutla. Terutama terkait strategi, rencana, persiapan personil dan anggaran penanganan bencana.

“Tadi kita ada sampaikan pula rekomendasi yang. Perlu strategi dan rencana yang baik melalui penyiapan anggaran, penyiapan personil, kemudian sarana prasarana, termasuk koordinasi di semua stakeholder yang ada harus diperkuat,” ucap Fatoni.

Sementara itu, Menko Polhukam Hadi

karhutla,” kata Menko Polhukam.

Berdasarkan prediksi BMKG musim kemarau akan terjadi pada bulan Juni-Juli namun masih normal sedangkan pada bulan Maret masih akan terjadi hujan dan curah hujan pada bulan April masih terjadi.

Menko Polhukam mengingatkan kepala daerah yang wilayahnya berpotensi Karhutla agar lebih waspada dan siaga darurat sejak awal.

“Pada bulan Mei curah hujan akan berkurang di Sumatera. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, September harap diwaspadai akan terjadi potensi karhutla di Sumsel, Riau, Kalteng. Untuk Jawa-Bali-NTB musim kering akan lebih dulu terjadi,” ucap Menko Polhukam.

Bagi para kepala daerah Menko Polhukam meminta segera lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan agar upaya

## Pantau Langsung Kondisi Lapangan

Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dilakukan penindakan. Sehingga penanganan Karhutla menjadi salah satu fokus utama Penjabat Gubernur Sumsel, Agus Fatoni selama menjabat.

Untuk melihat keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam menangani Karhutla ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya turun langsung ke lokasi sekaligus menggelar rapat bersama Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni bersama jajarannya.

Melihat kinerja dalam menangani Karhutla ini Menteri LHK Siti Nurbaya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumsel, Forkopimda, Bupati/Walikota serta stakeholder lainnya sudah bekerja keras.



berpotensi terjadi Karhutla. Rakorsus dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

Melalui kesempatan tersebut Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni memaparkan langkah-langkah dan program penanganan karhutla yang dilakukan Pemprov Sumsel.

Dia juga optimis Pemprov Sumsel kedepannya akan lebih baik lagi dalam penanganan bencana tersebut.

“Nah tahun ini kita tetap melakukan langkah-langkah seperti pada tahun lalu, meniru

Tjahjanto menyebut adanya prediksi fenomena El Nino masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Oleh karena itu, dia meminta seluruh Provinsi paling rawan karhutla segera mengambil langkah masif guna meminimalisir dampak bencana tersebut.

“Menyikapi karhutla dan El Nino tahun ini yang diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun. Maka kita harus mengambil langkah lebih masif sehingga kita menegaskan kembali komitmen seluruh kementerian lembaga untuk semakin meningkatkan kerjasama dan saling bahu membahu dalam peningkatan upaya penanggulangan

penanggulangan karhutla selaras dengan pemerintah daerah setempat. Berikan juga pendampingan bagi masyarakat petani tentang teknologi dan sosialisasi karhutla.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi masukan agar dalam penanganan karhutla selain pencegahan yang perlu mendapat perhatian adalah mitigasi pemadaman dan penanganan pasca bencana.

“Pemerintah daerah perlu membuat regulasi penanggulangan bencana, perencanaan anggaran, dan perluasan BPBD hingga ke daerah-daerah,” ucap Mendagri.

“Kita juga sudah menganalisis di wilayah Sumsel secara keseluruhan. Tahun 2023 jumlah titik panas mengalami penurunan menjadi 80 persen atau sekitar 10.090 titik dibanding dengan tahun 2019 jumlahnya 29.000 titik terus tahun 2015 jumlahnya 71.000 titik api,” katanya.

Selain itu, Siti Nurbaya mengatakan terkait perusahaan yang melanggar aturan sudah ada langkah-langkah oleh Ditjen Gakkum.

“Saya sudah mendapat laporan dari Pemda termasuk langkah-langkah sanksi hukum. Kita bisa paralel, tidak ada masalah,” ungkapnya. ●RDR



“Pada Februari 2024, terjadi deflasi (mtm) sebesar 0,13 persen dan inflasi (yoy) sebesar 4,6 persen, (ytd) sebesar 0,24 persen”

Anugrahani Prasetyowati

# PEMKAB OKI MASIF GELAR PASAR MURAH

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati OKI, Asmar Wijaya telah meluncurkan serangkaian kegiatan yang bertujuan menangani masalah inflasi saat ini.

Salah satunya melalui program pasar murah yang telah digelar sebanyak 20 kali guna meringankan beban masyarakat untuk membeli sembilan bahan pokok atau Sembako selama bulan Ramadhan.

“Operasi pasar murah dilaksanakan dalam bulan Ramadhan untuk meringankan beban masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa,” kata Asmar Wijaya pada gelaran pasar murah di Desa Serigeni Baru.

Ia menambahkan operasi pasar murah yang digelar terbuka untuk masyarakat umum, sehingga masyarakat bisa langsung membeli berbagai macam sembako yang disediakan dengan harga yang cukup murah.

“Operasi pasar murah yang dilaksanakan sangat terbuka untuk masyarakat umum dan bisa dibeli dengan harga yang murah. Kegiatan ini juga berkontribusi dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah,” ujarnya.

Pada kegiatan operasi pasar murah di Desa Serigeni Baru ditawarkan dengan harga sebelum-sebelumnya yaitu 1.000 paket sembako yang dipasaran itu senilai Rp. 110.000 bisa dibeli dengan harga Rp 70.000 serta 500 paket beras 5 kilogram plus minyak goreng 1 liter hanya Rp 65.000.

Melalui kegiatan pasar murah ini masyarakat OKI bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga terjangkau selama masa Ramadhan.

## Inflasi OKI Terjaga

Masifnya kegiatan pasar murah berimbas pada terjaganya angka inflasi di Kabupaten OKI ditengah fluktuasi harga sebagian kebutuhan pokok masyarakat jelang datangnya bulan Ramadhan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Februari 2024, Kabupaten OKI mengalami deflasi sebesar -0,13 persen (moon to moon) dibanding Januari lalu.

“Pada Februari 2024, terjadi deflasi (mtm) sebesar 0,13 persen dan inflasi (yoy) sebesar 4,6 persen, (ytd) sebesar 0,24 persen,” ujar Kepala BPS OKI, Anugrahani Prasetyowati.

Dijelaskan Hani, penyumbang utama deflasi bulan Februari 2024 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, minuman dan tembakau dengan kontribusi 0,88 persen.

“Selanjutnya komoditas penyumbang utama deflasi secara umum, antara lain Pepaya (0,37 %), Tomat (0,32 %), bawang merah (0,10 persen) dan bawang putih (0,06



Persen),” terangnya.

Penyumbang utama inflasi di Kabupaten OKI Februari (yty) antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 3,99 persen. Dengan Komoditas penyumbang utama beras, cabai merah dan telur Ayam Ras.

Pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memiliki andil 0,35 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan

Sementara kelompok penyedia makan dan minum atau restoran dengan andil 0,22 persen. Komoditas penyumbang utama in-

flasi kelompok ini adalah ikan bakar

## Ekonomi Bertumbuh

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKI terus melaju di tahun 2023 lalu.

“Perekonomian Kabupaten OKI tahun 2023 tumbuh 5,02 persen”, jelas Hani.

Dipaparkan dia, perekonomian Kabupaten OKI masih didominasi oleh tiga kategori utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebanyak (52,16%), konstruksi (13,39%), serta perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar (11,37%).

Sementara itu, Pj. Bupati OKI, Asmar Wijaya mengatakan kerja keras Pemda bersama berbagai stakeholder tidak sia-sia sehingga inflasi bisa terjaga. Namun dia meminta jajarannya untuk tidak berpuas diri apalagi akan menghadapi Hari Besar Keagamaan Ramadhan dan Idul Fitri.

“Selain tiga komponen yang telah disampaikan tadi menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini juga perlu diantisipasi komoditas lain seperti Cabe Merah, Bawang Merah, Beras. Salah satu caranya dengan terus mengoptimalkan operasi pasar pangan murah ataupun operasi pasar bersubsidi”, Terangnya.

Asmar juga meminta TPID OKI untuk mengevaluasi pelaksanaan pasar murah agar tepat sasaran.

“Pelaksanaan operasi pasar kita evaluasi. Pasarnya yang mendatangi masyarakat khususnya pada kantong-kantong kemiskinan. Bisa jadi akan digilir pada masing-masing desa atau kelurahan,” pintanya.

Asmar berharap, kondisi pertumbuhan ekonomi di OKI bisa terus bertumbuh maju dan angka inflasi bisa terjaga serta terkendali. ●RDR





# POPULER DARI PERISTIWA KECELAKAAN MAUT

**Gelaran pemilihan pemilihan walikota (Pilwako) Kota Palembang 2024 menjadi magnet bagi siapapun. Ada banyak calon yang mulai mengincar kursi penguasa Ibukota Sumatera Selatan.**

Selain Penjabat Walikota Palembang, Ratu Dewa muncul beberapa nama kandidat yang telah memproklamkan diri untuk ikut kontestasi Pilkada serentak tersebut.

Salah satunya Rasyid Rajasa anak Hatta Rajasa yang bakal baju dalam Pilwako Palembang pada November mendatang.

Sosok Rasyid Rajasa bahkan telah disiapkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk maju pada pilkada tersebut.

Sebelumnya, anak Hatta Rajasa sempat menjadi sorotan saat dirinya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I.

Sebab Rasyid Rajasa memasang baliho yang tak biasa. Balihoanya viral karena bertuliskan selain mencari suara, Rasyid juga mencari istri.

Sebelum terjun ke dunia politik, sosok Rasyid Rajasa pernah menjadi sorotan. Dimana 11 tahun silam, sosok Rasyid Rajasa anak Hatta Rajasa ini pernah terlibat kasus kecelakaan maut hingga menewaskan dua orang korban.

Peristiwa ini terjadi di tol Jagorawi pada Senin (1/1/2013) silam pukul 05.45 dini hari. Saat itu Rasyid hendak mengantarkan sang kekasih ke rumahnya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, dengan mobil BMW X5.

Ia pun melajukan mobil mewahnya ke tol dalam kota dan memutar ke Tol Jagorawi yang rencananya akan keluar di Tol TB Simatupang. Di jalur kanan Km 3+335 Tol Jagorawi, mobil yang dikendarai Rasyid terlibat benturan keras dengan mobil Daihatsu Luxio F 1622 CY yang dikemudikan Frans Joner Sirait.

Frans mengangkut 10 penumpang, yakni 5 orang di bagian belakang, 4 orang di bangku tengah, dan 1 orang di bangku depan.

Lima orang penumpang yang duduk di bangku paling belakang itu terlempar ke jalan lantaran pintu belakang Luxio terbuka setelah terbentur. Dua dari lima orang tersebut, Harun (50) dan Muhammad Reihan (1,5), meninggal dunia.

Kecelakaan maut yang melibat-

kan anak Hatta Rajasa itu berakhir dengan “Restorative justice” untuk Rasyid.

Hakim hanya memvonis Rasyid pidana penjara 5 bulan atau denda uang sebesar Rp 12 juta dengan masa percobaan hukuman selama 6 bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 8 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan dan subsider 6 bulan.

Rasyid Rajasa adalah anak politisi Hatta Rajasa dan Oktiniwati Ulfa Dariah Rajasa. Saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung. Rasyid tercatat lulus sarjana dari University of East London dalam program bisnis dan manajemen.

Rasyid identik dengan kegiatan wirausaha yang dilakoninya sejak lulus kuliah pada 2014 silam. Dia berpengalaman menahkodai sejumlah perusahaan.

Beberapa perusahaan yang ditanganinya yakni Co-founder PT Duta Perikanan Utama, Generating cash flow of PT Reethau Cipta Energi, Acquisition and post-acquisition sister company of PT Reethau Cipta Energy, Overseas Indonesian, dan terakhir Rasyid tercatat sebagai Direktur Arthindo Group sejak 2017 hingga kini. Bahkan Rasyid sejak 2017 sampai sekarang tercatat sebagai Direktur Arthindo Group.

## Bidik Kursi Walikota Palembang

Nama Hatta Rajasa memang tidak asing bagi masyarakat Sumatera Selatan karena dia adalah putra daerah. Selain Hatta Rajasa yang sukses sebagai menteri di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, adiknya Hafiz Thohir sukses menjadi anggota DPR RI dan Iskandar juga menjadi Bupati Ogan

Komering Ilir (OKI) dua periode.

Kini kesuksesan itu akan diturunkan kepada Rasyid Rajasa yang ternyata mendapat dukungan penuh dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilpu) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Selatan (Sumsel) Abdul Aziz menyiapkan Ketua Harian PAN DPD Kota Bandung M Rasyid Rajasa yang merupakan putra Hatta Rajasa jasa untuk maju sebagai calon Wali Kota Palembang 2024-2029.

Masuknya Rasyid Rajasa membuat nama H Nasrun Umar (HNU) yang sempat dijagokan PAN mulai terdengar samar-samar.

Pengamat politik dan akademisi dari Universitas Sriwijaya, M Haekal Al-Haffafah mengatakan, munculnya nama M Rasyid Rajasa yang didorong PAN tentu memberi suasana politik yang berbeda.

Sebagai pendatang baru, peluang Rasyid tetap terbuka namun secara realistis, dia bisa saja menjadi seorang wakil.

“Peluangnya ada, apalagi bila dipasangkan dengan Ratu Dewa atau Fitrianti Agustina yang memiliki elektabilitas tertinggi dalam survei Pilkada 2024,” ujarnya.

Dia menambahkan faktor kekuatan elektoral ini dinilai menjadi hal serius karena selain Rasyid, PAN sebelumnya sempat mengangkat nama Nasrun Umar sebagai Bacawako Palembang. Sehingga peluang HNU tetap saja ada untuk dicalonkan dari PAN.

Sementara pengamat sosial dan ekonomi, Yan Sulistyo mengatakan, masuknya nama-nama calon kepala daerah yang menggunakan privilege orangtua menjadi salah kemunduran demokrasi Indonesia.

Masyarakat tidak lagi disodorkan calon-calon berkualitas yang memang memikirkan rakyat tetapi dikasih pilihan tanpa melihat kualitas.

“Praktik-praktik dinasti demi mempertahankan kekuasaan seakan menjadi trend politik saat ini tanpa memikirkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat,” ujar Yan Sulistyo.

Ini adalah dampak buruk dari politik uang. Mereka yang punya uang punya peluang untuk maju di Pilkada, soal kualitas SDM bukan hal utama. Sehingga tidak heran peserta Pilkada hanya diikuti oleh orang-orang lama saja. ●RDR





“Kalau saya menceburkan diri di Parpol saat mau ceramah pasti umat berpikir saya ustadz dari partai A, seandainya di sana itu habitat partai B jadi saya tidak bisa masuk”

*Ustadz Solihin Hasibuan*

# INFO PROFIL

Minggu III • Maret 2024

# 21

## ULAMA JUGA HARUS PAHAM SOAL POLITIK

**Walaupun bergelut di bidang syiar agama bukan berarti tidak perlu memahami bidang ilmu lainnya seperti politik. Bahkan para ulama juga diwajibkan untuk terbuka soal politik agar tahu bagaimana kondisi dan situasi dunia.**

Demikian pandangan Ustadz Solihin Hasibuan terhadap politik. Sehingga tidak heran selain aktif menyebarkan syiar agama Islam di Sumatera Selatan dan mendirikan beberapa pondok pesantren. Dengan memiliki pemahaman mendalam soal politik membuat Ustadz Solihin Hasibuan menjadi alim ulama yang bisa masuk ke semua kalangan. Dengan keilmuannya, Ustadz Solihin Hasibuan kini didaulat sebagai Ketua Forum Ukhuwah Ulama Umaro Sumatera Selatan atau FU3SS.

Bahkan dia adalah salah satu pendiri dari Partai Keadilan (PK) yang kini telah berganti menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sepak terjangnya di dunia politik cukup diperhitungkan tokoh-tokoh politik dan para kepala daerah di Sumsel bahkan sangat senang menempel dengannya.

“Waktu itu saya ikut membantu mendirikan PK karena perintis jadi sempat menjadi pengurus pertama di partai tersebut. Setelah berdiri dan berjalan saya keluar karena sejujurnya saya hanya membantu untuk mendirikan PKS bukan ingin terjun ke politik saat itu ingin belajar ilmu politik saja,” kata pria humoris ini.

Uniknya Solihin Hasibuan aktif berpolitik namun dia tidak mau menceburkan diri ke salah satu partai politik tertentu. Hal tersebut dilakukannya agar bisa menyebarkan luaskan syiar agama Islam tanpa menggunakan label partai.

Padahal sebetulnya apabila fokus di politik bisa mendapatkan ketenaran, mendapatkan kekuasaan dan hidup mewah dengan menjadi caleg atau salah satu kepala daerah di Sumsel.

Namun baginya statusnya sebagai ustadz lebih utama sebab menjadi kader salah satu partai politik dan syiar agama memiliki perbedaan di mata umat. Hal itu bisa-bisa menghalangi langkah untuk berceramah syiar ajaran Islam.

“Kalau saya menceburkan diri di Parpol saat mau ceramah pasti umat berpikir saya ustadz dari partai A, seandainya di sana itu habitat partai B jadi saya tidak bisa masuk. Makanya saya tidak mau menjadi kader partai dan benar-benar berpolitik gara-gara itu,” ucapnya.

Untuk menjadi calon legislatif, dia punya

banyak kesempatan karena banyak yang memberikan dukungan baik moral maupun materi. Namun tidak terpikir juga harus seperti itu karena takutnya tidak bisa lagi ceramah jadi sulit untuk masuk ke semua kalangan. “Sekarang saya lebih merasa nyaman sekarang bisa ke masyarakat bisa ke pemerintahan bisa dekat dengan pejabat-pejabat di politik, karena lebih bebas ke semua kalangan tanpa adanya ingatan dengan sebuah Parpol. Bahkan mereka semua dari berbagai kalangan itu meminta saya ceramah,” paparnya.

Diakuinya kesehariannya mengemban jabatan sebagai Ketua FU3SS juga hanya untuk kepentingan kesejahteraan umat di Sumsel. FU3SS memiliki kewajiban besar menjaga keselarasan antara Ulama dan Umaro di Sumsel.

“Ulama adalah para ustadz dan habib

di Sumsel, kalau Umaro adalah para pemimpin kepala daerah di Sumsel. Nah tugas saya sebagai ketua FU3SS menjaga keselarasan antara ulama dan kepala daerah. Kalau ulama dan umaro tidak selaras akan menyebabkan kehancuran umat,” pungkasnya.

### Sudah Dipanggil Ustadz Sejak Kecil

Keterarikan Solihin Hasibuan pada pendidikan agama memang sudah sejak kecil. Bahkan sejak berusia 8 tahun dia sering disapa dengan sebutan ustadz.

“Mungkin ini sudah jadi jalan hidup dan doa dari kakek, nenek dan orang tua saya sejak umur 8 tahun saja saya sudah dipanggil oleh mereka ustadz, begitu juga semua orang di kampung. Alasannya saat kecil saya sudah rajin ke masjid dan berdzikir seperti ustadz makanya nenek, kakek, orang tua di umur 8 tahun saya sudah dipanggil ustadz,” katanya.

Dilanjutkannya setelah itu orang tuanya memasukkannya ke pondok pesantren modern Darussalam Gontor yang berada di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Disana Ustadz Solihin Hasibuan menempuh ilmu agama dan belajar cara syiar ajaran Islam.

“Di Gontor itu diajarkan bagaimana kita sebagai ustadz harus bisa masuk ke berbagai kalangan atau berguna untuk semua kalangan. Kalau berpolitik saya khawatir ajaran saya di Gontor itu tidak akan bisa saya jalankan sampai sekarang. Terlebih lagi wasiat orang tua saya di keluarga harus ada anak yang bisa menjadi alim ulama biar bisa membawa keluarga ke jalan baik dan apabila ada yang meninggal bisa menjadi imam dan mengurus secara baik,” kata pemilik Pondok Pesantren Ma’had Iz-zatuna yang berada di Jalan Palembang Tanjung Api-api Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Disisi lain, diam-diam Ustadz Solihin Hasibuan sangat mengidolakan sosok ulama besar bernama Zainuddin MZ juga merupakan politikus Indonesia dan dijuluki dengan sebutan Dai Sejuta Umat.

Solihin Hasibuan kagum karena almarhum Zainuddin MZ apabila ceramah selalu dihadiri ribuan umat yang setia mendengarkan syiar islam disebarkannya. Bahkan sampai sekarang ceramah Zainuddin MZ masih didengarkan umat Islam di Indonesia dari toa di masjid-masjid diputar sebelum salat dalam rekaman kaset dibuat almarhum sebelum meninggal dunia pada tahun 2011.

“Saya mengidolakan almarhum karena kalau ceramah umatnya ribuan dan peninggalan kasetnya masih didengarkan oleh semua orang. Terkejutnya saya sekarang bisa seperti idola saya itu, sekarang saya sudah ceramah di depan 50 ribu orang di BKB dan meninggalkan banyak ceramah dalam bentuk channel YouTube. Luar biasanya saya itu benar-benar tidak menyangka alhamdulillah saya bisa mewujudkan seperti idola Zainuddin MZ,” ujarnya.

Di dunia politik Ustadz Solihin Hasibuan memberikan pemahaman sosok pemimpin terbaik itu seperti apa. Baginya siapapun itu pemimpin tidak ada yang memiliki kebaikan apabila tidak bisa membawa pengikutnya atau rakyatnya selamat dari dunia dan akhirat.

“Sosok pemimpin yang baik itu idola saya nabi Muhammad SAW karena bisa membawa anggotanya mampu selamat dunia akhirat. Saya tidak salut dengan kepemimpinan walaupun Gubernur sekalipun paling jabatan normalnya hanya 5 tahun saja habis itu selesai. Tetapi kalau dia tidak bisa membawa selamat anggotanya (rakyatnya) jabatannya hanya 5 tahun pemimpin itu bisa masuk neraka selamanya,” pungkasnya. ●RDR



“Kami akan sepenuhnya menghormati prerogatif Bapak Prabowo sebagai insya Allah presiden terpilih nantinya untuk berbicara dengan pimpinan partai politik, dan menetapkan apa saja yang kemudian menjadi bagian dari hak partai-partai yang ikut mendukung beliau”

*Ganjar Pranowo*



# PAN MINTA JATAH MENDAG DAN MENKO

**Partai Amanat Nasional (PAN) diisukan meminta jatah menteri perdagangan dan satu menteri koordinator ke Prabowo Subianto. Isu ini berembus saat Partai Golkar secara terang-terangan meminta jatah lima kursi menteri.**

**S**ekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, menyatakan, saat ini, PAN masih fokus soal rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan persiapan menghadapi sengketa hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita sendiri di internal PAN sedang fokus juga untuk penghitungan suara, rekap suara ya hampir selesai, tetapi belum ada yang selesai juga. Ditambah lagi setelah ini kita juga harus fokus penanganan berbagai permasalahan sengketa PHPU yang akan diajukan ke MK, dan itu saya rasa perlu kita fokuskan karena waktunya hanya tiga hari,” kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.

Dia mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya soal jatah menteri kabinet kepada Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, untuk membatasinya. Apalagi, penentuan menteri kabinet merupakan prerogatif presiden terpilih.

“Perlu kami sampaikan, kami akan sepenuhnya menghormati prerogatif Bapak Prabowo sebagai insya Allah presiden terpilih nantinya untuk berbicara dengan pimpinan partai politik, dan menetapkan apa saja yang kemudian menjadi bagian dari hak partai-partai yang ikut mendukung beliau,” ujar Eddy.

“Bagi kami PAN, domain itu ada di ketua umum dan tentu bagi kami akan menghormati sepenuhnya apa yang disampaikan kelak nanti oleh Pak Prabowo dalam menjalankan prerogatifnya,” kata Eddy menambahkan.

Eddy mengakui, Prabowo dan Zulhas sudah sering bertemu dan tidak tertutup kemungkinan keduanya membahas soal kabinet. Hanya saja, Prabowo dan Zulhas pasti juga membahas sesuatu yang lebih besar dari sekadar kabinet, yakni masalah target ekonomi ke depan.

“Saya yakini Pak Zul dengan Pak Prabowo sudah melakukan pembahasan yang lebih luas, tidak sekadar masalah kabinet ke depannya. Saya kira bagaimana mencapai target-target ekonomi, target-target pembangunan ke depannya, dan ini saya rasa penting karena agenda pembangunan ekonomi yang dicanangkan Pak

Prabowo perlu kita langsung kejar, tidak bisa ditunda-tunda pada saat Pak Prabowo sudah menjadi presiden hari pertama, ibaratnya langsung berlari begitu,” jelas Eddy.

Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, memberikan tanggapannya soal berapa jumlah kursi yang diminta PAN di dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya. Menurut dia, pembagian jumlah kursi merupakan hak prerogatif Presiden.

Karena itu, ia menyerahkan kepada Prabowo jika nantinya dilantik menjadi Presiden. “Hak prerogatif presiden, terserah beliau,” kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Saat ditanya terkait Golkar yang meminta lima kursi menteri, Zulkifli pun enggan berkomentar. Ia meminta agar hal ini ditanyakan ke Airlangga. “Ya tanya Pak Airlangga dong, nanya kok ke saya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulhas pun mengaku baru saja berkomunikasi dengan Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan usai mengikuti rapat terbatas soal kebijakan pangan dan beras di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Ya hari-hari ini dengan

Pak Prabowo barusan. Lama dua jam sama Pak Prabowo kan. Ya ngomongin soal beras, soal produksi pertanian sama Pak Amran tuh, Pak Amran,” ujarnya.

Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, juga mengaku belum ada pembicaraan terkait jatah menteri kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Saleh mengatakan, partainya masih fokus mengurus rekapitulasi suara. Sekaligus bersiap-siap menghadapi perselisihan pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Rekapitulasi ini tinggal sebentar lagi. Setelah itu, kita belum bisa tenang-tenang.

Masih harus berjuang lagi di MK.

Mengamankan suara pilpres dan pileg. Khusus PAN, ada beberapa dapil yang kami siapkan untuk mengunggulkan. Data dan bukti sudah dikumpulkan. Sudah siap didaftarkan ke MK,” kata Saleh.

Saleh menerangkan, urusan jatah menteri adalah urusan bersama mitra koalisi. Terutama yang pada Pilpres 2024 memberikan tiket bersama kepada Prabowo-Gibran. Saleh menekankan, semua partai dalam koalisi Indonesia Maju memiliki peran strategis, termasuk dalam memenangkan Prabowo-Gibran.

“Alangkah indahnya, penetapan jatah menteri didasarkan atas kesepakatan bersama. Sebab, di parlemen pun nanti, semua koalisi pasti akan memiliki peran masing-masing. Prinsipnya, harus sama-sama. Tidak boleh ada yang ditinggalkan,” kata Saleh.

Dalam konteks ini, PAN meyakini bahwa Prabowo-Gibran akan mengambil tindakan yang bijaksana. Memberikan penilaian objektif kepada semua partai koalisi. Apalagi, pencalonan Prabowo sudah melalui jalan yang sangat panjang.

“Prabowo tiga kali menjadi capres. Nah, baru yang ketiga ini tembus. Selama tiga kali itu, PAN selalu menjadi pendukung utama. Tidak pernah pindah dukungan. Bahkan, Prabowo pernah berpasangan dengan Hatta Rajasa, ketua umum PAN,” ujarnya.

“Kalau dari sisi historis ini, PAN bisa saja berharap lebih. Selama ini, duka lara sudah sama-sama dihadapi. Giliran dapat suka cita, ya diharapkan tetap bersama. Ini poin penting yang juga perlu diingatkan,” kata mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Namun demikian, lanjut Saleh, persoalan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, PAN akan menghormati keputusan yang akan diambil oleh Prabowo. Sebab, kebersamaan tidak hanya soal kekuasaan saja. Hal itu sudah terbukti, pada periode pertama Presiden Jokowi, PAN juga konsisten ikut sebagai bagian dari partai yang berada di luar pemerintahan bersama dengan Gerindra.

“Urusan ini nanti sajalah. Sekarang kita fokus selesaikan semua tahapan pemilu. Yang penting, kebersamaan harus tetap dikokohkan,” ujarnya. ●RDO





“Ya sekitar 4,04 atau 4,05 persen. Jadi memang dari yang diumumkan oleh KPU, kalau berdasarkan rekapitulasi tidak jauh berbeda. Ada selisih 100-250 ribu suara”

Achmad Baidowi

# PDIP HATTRICK PPP-PSI KEOK

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional Pemilu 2024. Delapan partai politik dipastikan lolos ke Senayan dan sepuluh lainnya gagal, termasuk di antaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).**

**P**DIP meraih suara tertinggi untuk pemilihan anggota DPR dengan 25.387.278 suara atau 16,72 persen. Dengan raihan itu, PDIP otomatis akan melaju ke DPR.

Selain PDIP, partai lain yang ikut melenggang ke Senayan adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan raihan 16.115.655 suara atau 10,61 persen, Partai Gerindra 20.071.708 suara atau 13,22 persen, dan Partai Golkar 23.208.654 suara atau 15,28 persen.

Kemudian, disusul Partai Nasdem 14.660.516 suara atau 9,65 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 12.781.353 suara atau 8,42 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 10.984.003 suara atau 7,23 persen, dan Partai Demokrat 11.283.160 suara atau 7,43 persen.

Sementara itu, PPP dan PSI tak bisa mengirimkan wakilnya ke DPR karena tak dapat melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara nasional. PPP meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Sedangkan, PSI hanya meraih 4.260.169 suara atau 2,80 persen.

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, ogah berkomentar soal raihan suara partainya dalam Pileg DPR 2024 tidak mencapai ambang batas parlemen. Padahal, putra bungsu Presiden Jokowi itu awalnya mau memberikan keterangan soal pertemuan antara ia dengan Prabowo.

Kendati begitu, PSI di atas kertas masih berpeluang lolos ke parlemen apabila raihan suaranya bertambah berkat putusan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga kini belum diketahui apakah PSI akan mengajukan

perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau tidak.

Di sisi lain, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, mengatakan partainya akan menggugat hasil Pemilu 2024 itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan MK. Dia menyebut keputusan partainya itu atas dasar rapat ketua umum dan pucuk pimpinan partai.

“Kami siapkan gugatan ke Bawaslu dan MK dalam rangka mengembalikan suara PPP yang digembosi di beberapa dapil, justru setelah terjadinya coblosan,” kata Rommy dalam keterangan tertulisnya, Rabu malam, 20 Maret 2024.

Rommy beralasan, sejak 8-20 Maret 2024 partainya telah mengamati rekapitulasi perolehan suara dan mendapatkan hasil berbeda dari penetapan oleh KPU. Dia menyebut ada perbedaan angka yang signifikan dari hasil di daerah pemilihan atau dapil dan penetapan KPU.

Rommy mengklaim data internal partai perolehan suara justru melampaui 4 persen. “Berdasarkan data yang kami miliki, perolehan suara PPP jauh melampaui ambang batas parlemen 4 persen,” kata dia.

Dalam proses rekapitulasi, Rommy menyebut

DPP juga telah menarik seluruh saksi PPP dan tidak menandatangani hasil pleno KPU. “Sebagai bagian dari penggunaan hak konstitusional partai, menolak hasil pleno rekapitulasi tingkat nasional yang digelar KPU,” kata Rommy.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, juga mengaku cukup terkejut dengan hasil itu. Pasalnya, hasil itu berbeda dengan data internal partai berlogo kabah itu, di mana perolehan suara PPP secara nasional diklaim mencapai 4,04 persen.

“Ya sekitar 4,04 atau 4,05 persen. Jadi memang dari yang diumumkan oleh KPU, kalau berdasarkan rekapitulasi tidak jauh berbeda. Ada selisih 100-250 ribu suara,” kata dia.

Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, mengatakan, tugas partainya saat ini adalah memastikan kelengkapan data untuk mengajukan gugatan ke MK. Menurut dia, tim hukum PPP juga sudah siap untuk melakukan gugatan.

Bahkan, ia menambahkan, pihaknya telah melakukan gugatan kepada Bawaslu pada Rabu sore. Gugatan itu terkait dengan adanya salah input dan salah hitung di beberapa provinsi.

“Insya Allah itu

Berikut rekapitulasi lengkap hasil penghitungan suara untuk Pileg 2024 dari KPU

PARTAI LOLOS KE DPR
PDIP: 25.387.279 suara (16,72 persen)
Partai Golkar: 23.208.654 (15,28 persen)
Partai Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)
PKB: 16.115.655 (10,61 persen)
Partai NasDem: 14.660.516 (9,65 persen)
PKS: 12.781.353 (8,42 persen)
Partai Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)
PAN: 10.984.000 (7,23 persen)
PARTAI TAK LOLOS KE DPR
PPP: 5.878.777 (3,87 persen)
PSI: 4.260.169 (2,80 persen)
Partai Perindo: 1.955.154 (1,28 persen)
Partai Gelora: 1.281.991 (0,84 persen)
Partai Hanura: 1.094.588 (0,72 persen)
Partai Buruh: 972.910 (0,64 persen)
Partai Ummat: 642.545 (0,42 persen)
PBB: 484.486 (0,31 persen)
Partai Garuda: 406.883 (0,26 persen)
Partai PKN: 326.800 (0,21 persen)

nanti juga akan menjadi lampiran pengajuan kepada Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Awiek menyebutkan, pergersaran suara PPP paling banyak terjadi di Papua, termasuk di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Menurut dia, pergeseran suara itu cukup signifikan.

“Sudah kita laporkan ke Bawaslu, karena di situ memang mekanismenya. Noken, khususnya Papua Tengah dan Papua Pegunungan,” kata dia.

Ia menambahkan, pergersaran suara PPP juga disebut terjadi di Jawa Barat. Menurut dia, ada pergeseran dan ada penggelembungan dari partai lain yang merugikan PPP.

“Juga (ada) ketidakwajaran suara sah di sejumlah dapil. Itu juga menjadi sorotan bagi kami,” kata dia.

Sekretaris DPW PPP Nusa Tenggara Barat, Muh Akri berharap akan ada keajaiban menyusul rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional partai berlambang Ka'bah itu tak lolos ambang batas parlemen empat persen.

“Terkait keputusan rapat pleno KPU malam ini. Mudah-mudahan ada keajaiban,” kata Akri.

Akri mengaku membenarkan dan tidak menyangka partai yang dinaunginya tak lolos ambang batas parlemen empat persen dari suara sah secara nasional atau minimal 25 persen dari total suara sah di satu provinsi. ●RDO



“Airlangga mungkin akan mendapatkan resistensi di akhir dika-renakan belum ada Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat selama tiga kali berturut-turut”

Adi Prayitno



# AIRLANGGA MENUJU SEJARAH KETUM GOLKAR TIGA PERIODE

**Bursa calon ketua umum Partai Golkar sudah menghangat meski musyawarah nasional partai beringin itu masih sembilan bulan lagi. Sejumlah nama disebut-sebut akan meramaikan bursa calon ketua umum, tak terkecuali Airlangga Hartarto yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.**

**K**ans Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Partai Golkar lima tahun ke depan menguat setelah muncul dukungan dari para ketua dewan pimpinan daerah tingkat I dan II, serta organisasi sayap partai beringin. Kenaikan perolehan suara Golkar pada Pemilu 2024 menjadi alasan utama dukungan kembali diberikan.

Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sebagai organisasi pendiri partai Golkar mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga 2024-2029.

“Airlangga telah menunjukkan kinerja dan perhatian sampai dengan partai Golkar ke tingkat akar rumput,” kata Ketua Umum MKGR, Adies kadir, di Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024.

Dia mengungkapkan Airlangga telah memberikan perhatian kepada organisasi hasta karya, organisasi yang mendirikan dan didirikan partai Golkar, hingga organisasi sayap Golkar.

“Kami punya suara di musyawarah nasional (Munas). Kami punya suara sebagai organisasi pendiri. Dan yang memperhatikan cuma Airlangga Hartarto,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menegaskan, MKGR mendukung calon ketua umum yang sudah terbukti. Airlangga telah memberikan bukti dan memperlihatkan kerja nyata.

“Kami ormas MKGR tegak lurus dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto akan menjadi garda terdepan dalam mengawal, seperti dua periode sebelumnya saat maju menjadi ketua umum,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pakar MKGR, Azwir Dainy Tara, menyatakan, Airlangga sangat layak untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga. Alasannya, Airlangga berhasil mengantarkan Prabowo dan Gibran jadi presiden dan wakil presiden dengan sukses.

“Kami meminta seluruh warga Golkar, khususnya MKGR, meminta Airlangga untuk memimpin Golkar,” harapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo, juga meyakini Airlangga Hartarto sebagai kandidat kuat ketua umum Partai Golkar periode 2024-2029. Sebab, kesuksesan partai berlambang pohon beringin itu dalam Pemilu 2024 adalah portofolio untuk Airlangga.

Ia juga memandang Airlangga seperti mantan ketua umum Partai Golkar, Akbar Tandjung. Keduanya dipandang sebagai sosok yang kalem, tetapi berhasil membawa kesuksesan untuk partai.

“Ada yang gaya kepemimpinan itu meledak-ledak, tapi hasilnya tidak ada. Tapi Pak Airlangga ini gayanya hampir kaya Bang Akbar, cool atau kalem tapi pasti. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Airlangga ini bisa mampu merubah terhadap perolehan kursi partai,” ujar Firman, Senin, 18 Maret 2024.

Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga berhasil membawa Prabowo-Gibran menang pada Pilpres 2024. Menurutnya, partainya memegang andil besar dalam kemenangan tersebut. Selain itu, Partai Golkar menjadi pemenang kedua Pilleg 2024 di bawah PDIP. Mereka berpeluang besar mendapatkan lebih dari 100 kursi di DPR.

“Ini kan udah ukuran-ukuran yang jelas.

Oleh karena itu, supaya ke depan itu Golkar tak terjadi hiruk-pikuk yang belum tentu orang yang akan mencalonkan lebih baik, kenapa kita harus mencari alternatif lain,” ujar Firman.

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), R Wijaya

Dg Mapasomba, menilai, melonjaknya perolehan suara Partai Golkar di Pemilu 2024 disebabkan adanya sosok Airlangga Hartarto. Ia menyebut, kepemimpinan Airlangga mampu memimpin dan menggerakkan mesin politik partai secara masif.

Hal itu membuat kader mampu berkontribusi pada kemenangan Partai Golkar dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Ini harus diakui bahwa pengaruh Airlangga yang membangun konsolidasi yang kuat dari internal sampai ke masyarakat paling bawah menyebabkan lonjakan suara Partai Golkar,” kata Wijaya di Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.

Berdasarkan penghitungan internal Partai Golkar, partai berlambang pohon beringin itu unggul di 15 dari 38 provinsi pada kontestasi Pemilu 2024. Bahkan, Partai Golkar memperoleh 102 kursi DPR atau melonjak dibandingkan di Pemilu 2019 yang meraih 85 kursi.

Sementara itu, data Badan Pemenangan Pemilu (Bappil) Partai Golkar menunjukkan sebanyak 75-80 persen pendukung Partai Golkar memilih Prabowo-Gibran, sehingga akhirnya meraih suara 58 persen.

Menurut Wijaya, selain faktor Airlangga Hartarto, kemenangan Golkar juga disebabkan militansi kader yang terjun langsung di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi.

Wijaya mengatakan, hal tersebut tidak lepas dari peran Airlangga sebagai nakhoda partai, sehingga jumlah perolehan kursi Partai Golkar naik signifikan.

“Kalau suara partai naik kan pasti tergantung siapa ketua umumnya. Nah, pada saat ini kan Airlangga Ketua Golkar, berarti keberhasilan ini suatu pembuktian dari kepemimpinan beliau,” ujarnya.

Kemudian, kata Wijaya, Airlangga tepat menempatkan calon legislatif di sejumlah daerah yang

berpotensi menang.

“Inilah kehebatan Airlangga pendekatannya kepada figur yang berpengaruh di daerah itu, kemudian diusung menjadi caleg Golkar, akhirnya terbukti banyak caleg Golkar yang lolos ke Parlemen dan ini tidak bisa dinafikan bahwa memang kerja Airlangga,” tegasnya.

Wijaya mengaku tak setuju adanya anggapan suara Partai Golkar naik signifikan lantaran efek mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Justru sebaliknya, menurut dia, berkat Partai Golkar perolehan suara Prabowo-Gibran naik di beberapa daerah.

“Kalau ada yang mengatakan bahwa suara Partai Golkar naik karena mengusung Prabowo-Gibran, ya saya pikir tidak tepat. Karena Golkar merupakan partai besar dan salah satu partai tertua, tidak mungkin mengejar efek ekor jas Prabowo-Gibran,” tuturnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan jika Airlangga Hartarto adalah kandidat terkuat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga dinilai memiliki prestasi dalam meningkatkan suara Pileg 2024 secara drastis.

“Itu adalah hal yang tidak dapat terbantahkan dari Airlangga Hartarto,” katanya.

Adi menambahkan jika tidak mudah untuk Partai Golkar menghadapi Pemilu 2024 karena tidak memiliki jagoan kader sendiri. Namun, pada kenyataannya, suara Golkar dapat melesat jauh.

Adi menyampaikan jika secara alamiah, Airlangga mungkin akan mendapatkan resistensi di akhir dikarenakan belum ada Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat selama tiga kali berturut-turut. Menurutnya, untuk sekarang ini, mungkin belum terlihat. Namun, menjelang munas mungkin ada.

“Apalagi, Presiden Jokowi juga diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar. Namun, jika itu terjadi, Presiden Jokowi akan menjadi batu sandungan untuk Airlangga Hartarto,” paparnya.

Adi menyatakan, meskipun begitu, Airlangga sepertinya akan terus mengkapitulasi melonjaknya Pileg Golkar sebagai modal untuk dapat maju kembali sebagai ketua umum.

“Padahal, mungkin saja jika kemenangan dari pileg Golkar ini sebenarnya tidak terlepas dari kuatnya Ketua DPD 1 Golkar yang bekerja maksimal dan juga total,” bebernya. ●RDO

